



**Laporan Pelaksanaan Tugas
Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Sulawesi Tenggara
Tahun 2016**



**Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Sulawesi Tenggara**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Jalan Balai Kota No 7A Kendari

Telpon : (0401) 3121340-3122132

BAB I PENDAHULUAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara sebagai instansi vertikal menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peran yang sangat strategis di Daerah antara lain untuk mengaktualisasikan fungsi sebagai peneliti hukum, pembentukan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum dan pembinaan hukum. Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang adil, tidak diskriminatif dan tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Stakeholder lainnya. Disisi lain Kantor Wilayah berupaya terus untuk meningkatkan pelayanan Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovativ) terhadap masyarakat.

Dalam rangka mengemban tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara dihadapkan pada wilayah kerja yang cukup luas dengan kondisi geografis yang relatif cukup sulit pada beberapa daerah.





**BAB II
D A T A**

A. DIVISI ADMINISTRASI

1. Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016

Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Per Program (Seluruh Satker)

NO	UNIT/ SATUAN KERJA	PROGRAM						KET
		DUKUNGAN MANAJEMEN	REALISASI	%	SARANA & PRASARANA	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kanwil Sultra (Sekjen)	11.767.960.000	11.431.778.924	97.14	419.480.000	398.302.500	94.95	
2.	Kanwil Sultra (BPSDM)	1.196.000.000	1.144.938.076	95.73	-	-	-	
3.	Kanwil Sultra (Ditjen PAS)	526.050.000	494.710.600	94.04	-	-	-	
4.	Kanwil Sultra (Ditjen Imigrasi)	756.271.000	692.996.000	91.63	198.000.000	196,878,000	99.43	
5.	Kanwil Sultra (AHU))	2.010.109.000	1.209.215.500	60.16	-	-	-	
6.	Kanwil Sultra (HAKI)	165.000.000	140.993.000	85.45	-	-	-	
7.	Kanwil Sultra (Ditjen PP)	150.000.000	139.129.000	92.75	-	-	-	
8.	Kanwil Sultra (Ditjen HAM)	273.239.000	254.422.000	93.11	-	-	-	
9.	Kanwil Sultra (BPHN)	1.771.011.000	1.579.614.825	89.19	-	-	-	
10.	Kanwil Sultra (BALITBANGHAM)	65.000.000	61.359.500	94.40	-	-	-	
11.	Lapas Kelas IIA Kendari	10.665.323.000	10.684.266.445	100.18	839.850.000,-	839639.616,-	-	
12.	Lapas Kelas IIA Baubau	8.746.445.000	8.704.538.570	99.52	-	-	-	
13.	Rutan Kelas IIA Kendari	8.224.573.000	8.108.127.108	98.58	-	-	-	
14.	Rutan Kelas IIB Kolaka	5.356.654.000	5.173.953.523	96.59	-	-	-	
15.	Rutan Kelas IIB Raha	5.574.913.000	5.486.926.361	98.42	-	-	-	
16.	Rutan Kelas IIB Unaaha	4.966.139.000	4.973.993.739	100.16	-	-	-	
17.	Bapas Kelas II Kendari	2.326.686.000	2.278.675.192	97.94	-	-	-	
18.	Bapas Kelas II Baubau	1.371.003.000	1.262.701.564	92.10	-	-	-	
19.	Rupbasan Kelas I Kendari	2.343.001.000	2.249.288.153	96.00	-	-	-	
20.	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	5.660.793.000	5.549.654.229	98.04	1.763.458.000	1.758.365.600	99.71	
21.	Kanim Kelas III Baubau	5.782.493.000	5.485.012.953	94.86	3.516.774.00	3.350.473.975	95.27	
22.	Kanim Kelas III Wakatobi	2.151.233.000	1.545.743.871	71.85	-	-	-	
TOTAL		79.156.850.000	81.849.896.000	96.09	6.737.562.000	6.543.659.691	97.12	

Tabel Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Per Jenis Belanja

NO	UNIT/SATKER	BELANJA								
		PEGAWAI			BARANG			MODAL		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kanwil Sultra (Sekjen)	7.155.683.000	7.110.485.849	99,37	4.192.797.000	3.922.990.575	93,57	419.480.000	398.302.500	94,95
2.	Kanwil Sultra (AHU))	-	-	-	2.010.109.000	1.209.215.500	60,16	-	-	-
3.	Kanwil Sultra (Ditjen PAS)	-	-	-	526.050.000	494.710.600	94,04	-	-	-
4.	Kanwil Sultra (Ditjen Imigrasi)	-	-	-	558.271.000	496.118.000	88,7	198.000.000	196,878,000,-	99,43
5.	Kanwil Sultra (HAKI)	-	-	-	165.000.000	140.993.000	85,45	-	-	-
6.	Kanwil Sultra (Ditjen PP)	-	-	-	150.000.000	139.129.000	92,75	-	-	-
7.	Kanwil Sultra (Ditjen HAM)	-	-	-	273.239.000	254.422.000	93,11	-	-	-
8.	Kanwil Sultra (BPSDM)	-	-	-	1.771.011.000	1.579.614.825	89,19	-	-	-
9.	Kanwil Sultra (BALITBANGHAM)	-	-	-	65.000.000	61.359.500	94,40	-	-	-
10.	Kanwil Sultra (BPSDM)	-	-	-	1.196.000.000	1.144.938.076	95,73	-	-	-



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No. 7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

NO	UNIT/SATKER	BELANJA								
		PEGAWAI			BARANG			MODAL		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	LP Kelas IIA Kendari	5.700.468.000	5.774.336.426	101.30	4.125.005.000	4.070.290.403	98.67	839.850.000	839.639.616	-
12.	LP Kelas IIA Baubau	4.939.189.000	4.951.196.733	100.24	3.807.256.000	3.753.341.837	98.58	-	-	-
13.	RT Kelas IIA Kendari	4.258.208.000	4.212.928.351	98.94	3.966.365.000	3.895.198.757	98.21	-	-	-
14.	RT Kelas IIB Unaaha	2.694.319.000	2.744.941.202	101.88	2.271.820.000	2.229.052.537	98.12	-	-	-
15.	RT Kelas IIB Kolaka	2.812.047.000	2.770.701.718	98.53	2.544.607.000	2.403.251.805	94.44	-	-	-
16.	RT Kelas IIB Raha	3.228.222.000	3.247.243.056	100.59	2.346.691.000	2.239.683.305	95.44	-	-	-
17.	Bapas Kelas II Baubau	786.606.000	725.333.812	92.21	584.397.000	537.367.752	91.95	-	-	-
18.	Bapas Kelas II Kendari	1.692.612.000	1.698.034.414	100.32	634.074.000	580.640.778	91.57	-	-	-
19.	Rupbasan Kelas I Kendari	1.826.805.000	1.755.102.782	96.07	561.196.000	494.185.371	95.74	-	-	-
20.	Kanim Kelas I Kendari	2.289.030.000	2.387.423.266	97.88	1.458.305.000	1.403.865.363	96.27	1.763.458.000	1.758.365.600	99.43
21.	Kanim Kelas III Baubau	555.266.000	729.956.468	131.46	1.710.453.000	1.404.582.510	82.12	3.516.774.000	3.350.473.975	95.27
22.	Kanim Kelas III Wakatobi	738.632.000	625.537.121	84.69	1.412.601.000	920.206.750	65.14	-	-	-
TOTAL		35.279.457.000	38.827.087.000	38.733.221.198	99.76	36.285.247.000	33.375.158.244	91.98	6.737.562.000	6.543.659.691

Tabel Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

NO	UNIT/ SATKER	Kegiatan	Volume/ Unit	Biaya (Rp.)	Realisasi		Permasalahan/ Keterangan
					Keuangan (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KANTOR WILAYAH SULTRA (SEKJEN)	<u>Sarana dan Prasarana Kanwil/UPT</u>		419.480.000	398.302.500	94.95	
2.	KANTOR WILAYAH SULTRA (Divisi Imigrasi)			198.000.000	196.878.000	99.43	
3.	KANWIL HUKUM & HAM SULTRA (DITJEN HAM)			-	-	-	
4.	KANWIL HUKUM & HAM SULTRA (BPHN)			-	-	-	
5.	LAPAS KENDARI			839.850.000	839.639.000	-	
6.	LAPAS BAUBAU			-	-	-	
7.	RUTAN KENDARI			-	-	-	
8.	RUTAN UNAHAHA	<u>Sarana dan Prasarana Kanwil/UPT</u>		-	-	-	
9.	RUTAN KOLAKA			-	-	-	
10.	RUTAN RAHA			-	-	-	
11.	BAPAS KENDARI			-	-	-	
12.	BAPAS BAUBAU			-	-	-	
13.	RUPBASAN			-	-	-	
14.	KANTOR IMIGRASI KELAS I KENDARI			1.763.458.000	1.758.365.600	99.71	
15.	KANIM BAU-BAU	<u>Sarana dan Prasarana Kanwil/UPT</u>		3.516.774.000	3.350.473.975	95.27	
16.	KANIM WAKATOBI			-	-	-	
TOTAL				6.737.562.000	6.543.659.691	97.12	

2. Laporan SAI (SAK dan SABMN)

Pelaksanaan SAK di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara berkoordinasi dengan DJP Wilayah XXV sampai saat ini tidak ada kendala data antara rekon dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke KPPN dengan rekon yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dengan DJP tidak ada selisih.



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

Dalam rangka mentertibkan Barang Inventaris Negara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara telah melakukan langkah-langkah penertiban dengan mengaktifkan SABMN.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara diperoleh dari sektor Keimigrasian dan pelayanan Jasa Hukum, penerimaan PNBP selama Tahun 2016 sektor Keimigrasian sebesar RP. **3.815.281.115,-** Pelayanan Jasa Hukum Rp. **943.650.000,-** dan Penerimaan jasa lainnya Rp. **1.269.000,-** jadi jumlah Total Penerimaan PNBP per 30 Desember 2016 Rp. **4.760.200,115,-**

4. Kepegawaian

Tabel Jumlah Pegawai Satker di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

NO	UNIT/ SATKER	JUMLAH PEGAWAI								TINGKAT PENDIDIKAN										JUM	TOTAL				
		GOLONGAN								SD		SLTP		SLTA		D3		S1				S2		S3	
		IV		III		II		I		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			L	P	L	P
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	KANWIL SULTRA	19	-	46	29	10	7	-	-	-	-	-	10	8	4	3	36	25	24	1	-	-	74	37	111
2	LP KENDARI	2	-	48	12	29	5	-	-	-	-	-	45	5	4	3	23	8	7	1	-	-	79	17	96
3	LP BAU-BAU	1	-	46	4	25	4	-	-	-	-	-	43	3	4	2	21	3	4	-	-	-	72	8	80
4	RT KENDARI	1	-	41	8	19	6	-	-	-	-	-	25	6	2	2	33	6	1	-	-	-	61	14	75
5	RT UNAAHA	1	-	26	1	22	3	-	-	-	-	-	23	2	4	1	21	1	1	-	-	-	49	4	53
6	RT KOLAKA	-	-	25	2	13	4	-	-	-	-	-	24	6	1	-	13	-	-	-	-	-	38	6	44
7	RT RAHA	-	-	28	5	17	3	-	-	-	-	-	37	3	1	1	7	4	-	-	-	-	45	8	53
8	BAPAS BAU-BAU	-	-	6	3	1	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3	2	1	-	-	-	7	4	11
9	BAPAS KENDARI	1	-	9	10	4	6	-	-	-	-	-	4	3	1	4	8	9	1	-	-	-	14	16	30
10	RUPBASAN KENDARI	0	-	15	4	12	2	-	-	-	-	-	17	1	1	1	8	3	1	1	-	-	27	6	33
11	KANIM KENDARI	1	-	18	9	6	8	-	-	-	-	-	7	5	2	1	12	11	4	-	-	-	26	16	42
12	KANIM BAU-BAU	-	-	3	-	7	4	-	-	-	-	-	1	1	6	3	2	-	1	-	-	-	10	4	14
13	KANIM WAKATOBI	-	-	3	-	7	3	-	-	-	-	-	3	1	6	2	1	-	1	-	-	-	10	3	13
TOTAL		26	-	314	87	172	56	-	-	-	-	-	240	46	37	23	188	72	46	3	-	-	512	143	655

Tabel Pejabat Struktural di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

NO	UNIT/SATKER	PEJABAT ESELON										JPU	TOTAL	JABATAN KOSONG
		I		II		III		IV		V				
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	KANWIL SULTRA	-	-	1	4	9	-	18	-	-	-	79	111	-
2	LP KENDARI	-	-	-	-	1	-	5	-	8	-	82	96	-
3	LP BAU-BAU	-	-	-	-	1	-	5	-	8	-	66	80	-
4	RT KENDARI	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	70	75	-
5	RT UNAAHA	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	49	53	-
6	RT KOLAKA	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	40	44	-
7	RT RAHA	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	50	53	1
8	BAPAS BAU-BAU	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	7	11	-
9	BAPAS KENDARI	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	26	30	-
10	RUPBASAN KENDARI	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	30	33	-
11	KANIM KENDARI	-	-	-	-	1	-	5	-	7	-	29	42	4
12	KANIM BAU-BAU	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	12	14	2
13	KANIM WAKATOBI	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	10	13	1



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

TOTAL	-	-	-	1	4	12	-	41	-	47	-	550	655
-------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	-----	-----

Tabel Jumlah kebutuhan pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2016

NO	UNIT/SATKER	JMLH KEBUTUHAN PEGAWAI	JMLH PEGAWAI YANG ADA	KEKURANGAN PEGAWAI (3-4)
1	2	3	4	5
1	KANWIL SULTRA	144	111	33
2	LP KENDARI	150	96	54
3	LP BAU-BAU	130	80	50
4	RT KENDARI	100	75	25
5	RT UNAAHA	70	53	17
6	RT KOLAKA	60	44	16
7	RT RAHA	74	53	21
8	BAPAS BAU-BAU	28	11	17
9	BAPAS KENDARI	38	30	8
10	RUPBASAN KDI	33	33	0
11	KANIM KENDARI	55	42	13
12	KANIM BAU-BAU	20	14	6
13	KANIM WAKATOBI	20	13	7
TOTAL		922	655	267

B. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

1. Pelayanan Fidusia

Pelayanan permohonan Pendaftaran Fidusia pada umumnya meningkat dari tahun ke tahun sehingga meningkatkan PNPB pada sektor ini. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah permohonan yang direalisasi pada tahun 2016, sebagai berikut:

NO	BULAN	PENDAFTARAN	PERUBAHAN	PENGGANTIAN	PENGHAPUSAN	PNBP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Januari	4.248	1	-	16	353.200.000
2.	Februari	3.845	2	-	29	331.600.000
3.	Maret	3.042	2	-	10	247.500.000
4.	April	4.077	6	-	26	340.750.000
5.	Mei	3.666	1	-	43	303.900.000
6.	Juni	3.052	4	-	35	294.900.000
7.	Juli	3.223	3	-	30	271.900.000
8.	Agustus	4.142	1	-	19	326.850.000
9.	September	2.780	3	-	22	214.750.000
10.	Oktober	3.859	-	-	32	285.850.000
11.	November	3.794	3	-	56	306.300.000
12.	Desember	4.090	2	-	32	351.500.000
J U M L A H		43.818	28	0	350	3.629.000.000

2. Pelayanan Kewarganegaraan



Tidak terdapat Pelayanan kewarganegaraan selama tahun anggaran 2016

3. Pelayanan HKI

Tabel Jumlah Permohonan di Bidang HKI Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2016

NO	JENIS	PERMOHONAN	PNBP	KETERANGAN
1.	Hak cipta	11	3.300.000	-
2.	Hak Merek	6	6.000.000	-
	JUMLAH	17	9.300.000	-

4. Pelayanan Kenotariatan

Jumlah Notaris se Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 68 orang, dan dalam rangka pembinaan Notaris masih terbatas karena masih minimnya anggaran yang tersedia sehingga pada tahun 2016 hanya dapat dilekukan sebanyak 1 kegiatan yaitu Rakor Majelis Pengawas dan Majelis Pengawas Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2016 di Hotel D'Bliz sedangkan Pelayanan kenotariatan yaitu permohonan Pelantikan Notaris baru dan Notaris Pengganti pada Tahun 2016 di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dapat di lihat pada tabe sebagai berikut :

NO	BULAN	NOTARIS BARU	NOTARIS PENGGANTI	JUMLAH PNBP
1.	Januari	2	1	7.500.000,-
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	-	-	-
4.	April	3	1	10.000.000,-
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	-	-	-
7.	Juli	-	-	-
8.	Agustus	2	1	7.500.000
9.	September	1	-	2.500.000
10.	Oktober	-	-	-
11.	November	-	-	-
12.	Desember	2	-	5.000.000
	JUMLAH	10	3	32.500.000,-

5. Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

NO.	MATERI	PESERTA / NARASUMBER	LOKASI	WAKTU / PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Masyarakat Ekonomi ASEAN	Siswa-siswi SMA/SMK/MA	Kabupaten Muna	28 Januari 2016	Ceramah
2.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Siswa-siswi SMA/SMK/MA	Kabupaten Muna	28 Januari 2016	Ceramah
3.	Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Tomang Pasaribu,SH.,M. H	- Radio Republik Indonesia Kendari	29 Februari 2016	Dialog Interaktif
4.	Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Drs. H.M.Nusuking Ahmad .M.H.	Radio Swara Alam Kendari	1 Maret 2016	Dialog Interaktif
5.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Ahmad Syahrir , SH., M.H.	Radio Swara Alam Kendari	14 Maret 2016	Dialog Interaktif
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Musba Bakri, S.H.,M.H.	Radio Swara Alam Kendari	14 s/d 16 Maret 2016	Dialog Interaktif
7.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	-Cipta Sembiring S.H., M.H. -Karmi, SH.	Radio Swara Alam Kendari	14 s/d 16 Maret 2016	Dialog Interaktif
8.	1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 2. Undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 3. Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika 4. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 5. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM	pengunjung pameran	Kabupaten Kolaka	21 s/d 28 April 2016	Pameran peningkatan budaya Hukum
9.	1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2. Undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 3. Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika 4. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 5. Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	- 5 (lima) orang peserta, dan 1 (satu) orang pendampingn dari Bagian Hukum Kota Kendari. - 7 (tujuh) orang Tim Pembina Kanwil Kemenkumham Sultra.	Hotel Putri Duyung Ancol Jakarta Utara	01 s/d 05 Agustus 2016	Lomba Kadarkum Tingkat Nasional



Pelaksanaan Monitoring /Evaluasi dan Pengawasan Daerah Bantuan Hukum

NO.	MATERI	TIM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1.	Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta Peraturan Pelaksanaannya	- Agustinus Tangkemanda , SH.,M.H - Musba Bakri, SH,MH. - Erwinsyah Agus, S.H. - Usman, S.H. - Evi Risnawati, SH. - Abdi Amin , SH.	-YLBH Permata Adil Sultra. -LBH Kendari -Posbakum Adin PN Kendari	11 s/d 12 April 2016	
2.	Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya	- Agustinus Tangkemanda , SH.,M.H - Musba Bakri, SH,MH. - Erwinsyah Agus, S.H. - Usman, S.H. - Evi Risnawati, SH. - M.Fauzan T,	-Posbakum Adin PTUN Kendari -LBH Sultra Menggugat -Lapas Kelas IIA Kendari	3 s/d 4 Mei 2016	
3.	Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya	- Agustinus Tangkemanda , SH.,M.H - Musba Bakri, SH,MH. - Erwinsyah Agus, S.H. - Usman, S.H. - Evi Risnawati, SH. - Abdi Amin , SH.	-LBH Duta Keadilan Sultra -LBH HAMI Sultra -Rutan Kelas IIA Kendari	16 s/d 17 Mei 2016	
4.	Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya	- Agustinus Tangkemanda , SH.,M.H - Musba Bakri, SH,MH. - Erwinsyah Agus, S.H. - Usman, S.H. - Evi Risnawati, SH. - Eka Vasniati, SH.	-Kabupaten Muna	13 s/d 15 April 2016	
5.	Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya	- Agustinus Tangkemanda , SH.,M.H - Musba Bakri, SH,MH. - Erwinsyah Agus, S.H. - Usman, S.H. - Evi Risnawati, SH.	-Kabupaten Konawe Selatan	11 s/d 13 Mei 2016	
6.	Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya	- Agustinus Tangkemanda , SH.,M.H - Musba Bakri, SH,MH. - Erwinsyah Agus, S.H. - Usman, S.H. - Evi Risnawati, SH. - Fiqhy Saranani	-Kota BauBau	18 s/d 20 Mei 2016	
7.	Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta Peraturan Pelaksanaannya	- Musba Bakri, SH,MH. - Erwinsyah Agus, S.H. - Usman, S.H. - Evi Risnawati, SH.	- YLBH Permata Adil Sultra. - LBH Kendari - Posbakum Adin PN Kendari - LBH Duta Keadilan Sultra - LBH HAMI	08 s/d 09 September 2016	



Koordinasi Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat

NO.	MATERI	TIM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1.	Koordinasi pelaksanaan Konsultasi Hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toman Pasaribu, S.H., M.H. 2. Agustinus Tangkemandu, S.H., M.H. 3. Musba Bakri, SH,MH. 4. Erwinsyah Agus, S.H. 5. Usman, S.H. 6. Evi Risnawati, SH. 7. Eka Vasniati 	- Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara	13 September 2016	
2.	Koordinasi pelaksanaan Konsultasi Hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agustinus Tangkemandu, SH.MH. 2. Musba Bakri, SH,MH. 3. Erwinsyah Agus, S.H. 4. Usman, S.H. 5. Evi Risnawati, SH. 6. Abdi Amin, SH. 	<ul style="list-style-type: none"> - YLBH Permata Adil Sultra. - LBH Kendari - Posbakum Adin PN Kendari. 	11 s.d. 12 Oktober 2016	

Sosialisasi Bantuan Hukum

NO.	MATERI	TIM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1.	Sosialisasi pelaksanaan Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Bantuan Huku Terakreditasi di Wilayah Prov.Sultra. 2. Pengadilan Tinggi Sultra 3. Polda Sultra 4. Kejaksaan Tinggi Sultra 5. Kanwil Kemenkumham Sultra 	Hotel Zenith Kendari	24 Oktober 2016	

6. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)

Telah dilakukan koordinasi dengan jaringan lainnya terutama pemerintah Provinsi sebagai pusat jaringan dan Kabupaten/Kota sebagai anggota jaringan. Disamping itu juga telah melakukan pelayanan perpustakaan terhadap masyarakat terutama mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Sementara ini koleksi buku diperpustakaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara tahun 2016 tidak mengalami peningkatan sebab tidak ada pengadaan buku perpustakaan selama tahun 2016.



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah melaksanakan kegiatan pengelolaan perpustakaan juga pelayanan masyarakat berupa :

Pengelolaan JDIH :

- Pembuatan Katalog
- Kliping koran
- Abstraksi Hukum

Abstraksi Hukum

Bulan	Abstraksi
Januari	Undang –Undang Peradilan Militer
Februari	Undang-Undang Keuangan Negara.
Maret	Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Tahun 2000.
April	Lalu lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
Mei	Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Juni	Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan dan Peraturan Pemerintah RI No.5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
Juli	Himbunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 Bank Indonesia.
Agustus	Undang-Undang Intelijen Negara
September	Undang-Undang Parpol dan Pemilu
Oktober	Himbunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 Bank Indonesia.
November	Undang-Undang Intelijen Negara
Desember	Undang-Undang Parpol dan Pemilu

Katalog

Bulan	Judul Buku
Januari	Perlindungan terhadap saksi terintimidasi dan Perbandingan Hukum Pidana.
Februari	Tindak pidana korupsi dan fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan perdagangan organ tubuh manusia.
Maret	Pengkajian Hukum tentang kriminalisasi , pengembalian aset, kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB dan Hukum Pidana Ekonomi.
April	Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Jaminan Fidusia
Mei	Pokok-pokok Badan Hukum dan Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan
Juni	Hukum perlindungan Konsumen dan Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam.
Juli	Memahami Hukum kepolisian, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)
Agustus	Hukum Pencemaran Laut Transnasional, Tips dan trik menghadapi kasus hukum



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No. 7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

September	Hukum Proyek Konstruksi Bangunan Dalam Perspektif Pelayanan Publik yang baik di Indonesia, Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang Bersih.
Oktober	Dasar-dasar Hukum Media, Pemenuhan HAM dalam hal pengurusan Paspor bagi WNI keturunan Tionghoa
November	Pengawasan pemerintah Daerah, Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa
Desember	Hukum Responsif, Hukum Pertambangan Indonesia.

Pembuatan klipng Koran.

Bulan	Sumber Berita	Jumlah
Januari	Koran Kompas dan Kendari Pos	10 (sepuluh) buah exemplar
Februari	Koran Kompas Kendari Pos	10 (sepuluh) buah exemplar
Maret	Koran Kompas Kendari Pos	10 (sepuluh) buah exemplar
April	Koran Kompas dan Kendari Pos	10 (sepuluh) buah exemplar
Mei	Koran Kompas Kendari Pos	10 (sepuluh) buah exemplar
Juni	Koran Kompas Kendari Pos	10 (sepuluh) buah exemplar
Juli	Koran Kompas dan Kendari Pos	10 (sepuluh) buah exemplar
Agustus	Koran Kompas Kendari Pos	10 (sepuluh) buah exemplar
September	Koran Kompas Kendari Pos	10 (sepuluh) buah exemplar
Oktober	Koran Kompas dan Kendari Pos	10 (sepuluh) buah exemplar
November	Koran Kompas Kendari Pos	10 (sepuluh) buah exemplar
Desember	Koran Kompas Kendari Pos	10 (sepuluh) buah exemplar

Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kegiatan yang telah dilaksanakan	Bentuk Kegiatan	Keterangan
Bimtek JDIIH	<ol style="list-style-type: none"> Tanggal 14 Januari 2016 pembentukan Panitia Mengirim undangan untuk narasumber dan pemanggilan peserta Mengirim undang pembukaan dan penutupan Bimtek Rapat pemantapan kegiatan Bimtek tanggal 02 s/d 03 Februari 2016 di Kabupaten Kolaka Utara 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen - SK Panitia - Daftar hadir - Notulen Rapat - Laporan

Peningkatan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kegiatan yang telah dilaksanakan	Tanggal / Tempat Kegiatan	Keterangan
Peningkatan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Tanggal 13-14 April 2016 dilaksanakan di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Timur Tanggal 18-19 April 2016 dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten dan Konawe Selatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen - SK Panitia - Laporan



Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah

Kegiatan yang telah dilaksanakan	Tanggal / Tempat Kegiatan	Pemateri
Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah	Tanggal 15 s/d 16 September 2016 dilaksanakan di Hotel Zenith , diikuti 30 (tiga puluh) orang peserta . Selain Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Kanwil juga melibatkan Biro dan sebahagian Bagian Hukum Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tenggara	- Mahkamah Konstitusi - Dirjen PP - Kanwil - Akademisi dari Unhalu

7. Legislasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota untuk diikutsertakan dalam pembahasan Raperda dan agar setiap PERDA maupun RAPERDA di kirim ke Kantor Wilayah.

Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan yang telah dilaksanakan	Bentuk Kegiatan	Keterangan
Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	- Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 26 tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan pasar	Dokumen 1. Daftar hadir 2. Notulen 3. Dokumentasi /foto
Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	➤ Provinsi. Rapat Pembahasan : 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 3. Raperda tentang Pengelolaan Hutan Lindung 4. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. - Kabupaten Buton Utara Rapat Pembahasan : 1. Raperda tentang Garis Sepadan Jalan 2. Raperda tentang mekanisme Izin usaha di Bidang Informasi dan komunikasi 3. Raperda tentang Organisasi dan tata Kerja	Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

	<p>Kantor Penghubung Pemerintah Kab. Buton Utara ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Raperdatentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan Gedung di Kab.Buton Utara: 5. Raperda tentang Pemberdayaan Pengembangan Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu 6. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab.Buton Utara No.17 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 7. Raperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 8. Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Buton Utara; 9. Raperda tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir <p>- Kota Kendari. Rapat Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; 2. Raperda tentang Pembentukan Kecamatan Nambo; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan; 4. Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Rahandauna dan Kelurahan Bende. 	
<p>Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ➤ Konsultasi Publik Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 	
<p>Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kabupaten Kolaka Rapat pembahasan: Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ➤ Kota Baubau Raperda tentang Pendirian Perusahaan Daerah PO – Lima Kota Baubau ➤ Kabupaten Konawe 1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe 	



	<p>Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <p>2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>➤ Kabupaten Konawe Selatan</p> <p>1. Raperda tentang Perubahan Pertama terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>2. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.</p> <p>3. Raperda tentang Perubahan Pertama terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin tempat Usaha</p> <p>4. Raperda tentang Perubahan Pertama terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>➤ Kabupaten Muna Barat</p> <p>1. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar</p> <p>2. Raperda tentang Reklame.</p>	
--	--	--

Bimtek Naskah Akademik

Kegiatan yang telah dilaksanakan	Bentuk kegiatan	Keterangan
Bimbingan Teknis tentang Naskah Akademik	<ol style="list-style-type: none">1. Tanggal 18 Januari 2016 Pembentukan panitia2. Mengirim undangan untuk narasumber dan pemanggilan peserta3. Mengirim undangan pembukaan dan penutupan Bimtek4. Rapat pemantapan kegiatan Bimtek5. Pelaksanaan kegiatan Bimtek tanggal 10 s/d 11 Februari 2016 di Kabupaten Bombana	<p>Dokumen</p> <ul style="list-style-type: none">- SK Panitia- Daftar hadir- Notulen rapat- Laporan



Inventarisasi Program Legislasi Daerah

Kegiatan yang telah dilaksanakan	Tanggal / Tempat kegiatan	Keterangan
Inventarisasi Program Legislasi Daerah	1. Tanggal 13-15 April 2016 dilaksanakan di Kab.Bombana, Kab.Kolaka, Kab.Konawe, Kota BauBau, Kab.Muna, Kab. Konawe Kepulauan dan Kabupaten Konawe Selatan. 2. Tanggal 18-20 April 2016 di laksanakan di Konawe Utara; 3. Tanggal 26 Mei 2016 dilaksanakan di Kota Kendari.	Dokumen - SK Panitia - Daftar hadir - Notulen rapat - Laporan
Inventarisasi Program Legislasi Daerah	Mendata daftar Program Legislasi Daerah se Provinsi, Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara.	- Dokumen - Laporan

Bimtek Prolegda

Kegiatan yang telah dilaksanakan	Tanggal / Jadwal kegiatan	Keterangan
Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah	1. Tanggal 22 April 2016 Rapat persiapan dan Tanggal 27 Mei 2016 Rapat pemantapan; 2. Mengirim undangan untuk Narasumber dan pemanggilan peserta; 3. Mengirim undangan pembukaan Bimtek 4. Rapat pemantapan kegiatan Bimtek; 5. Pelaksanaan kegiatan Bimtek tanggal 30 s/d 31 Mei 2016 di Kota BauBau.	Dokumen - SK Panitia - Daftar hadir - Notulen rapat - Laporan

Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah

Kegiatan yang telah dilaksanakan	Tanggal / Jadwal kegiatan	Keterangan
Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah.	1. Tanggal 22 April 2016 Rapat persiapan dan tanggal 25 April 2016 Rapat Pemantapan; 2. Mengirim undangan untuk narasumber dan Pemanggilan Peserta 3. Rapat pemantapan kegiatan Bimtek; 4. Pelaksanaan kegiatan Bimtek tanggal 27-28 April 2016	➤ Dokumen - SK Panitia - Daftar hadir - Notulen rapat - Laporan



8. RANHAM

Dalam rangka pelayanan Komuniasi Masyarakat (YANKOMAS), Kantor Wilayah telah menerima laporan komunikasi maupun informasi serta permohonan bantuan hukum dari instansi terkait (mitra kerja) maupun dari masyarakat, YANKOMAS menerima 16 (enam belas) kasus dan sudah melakūkan telaah dan rapat koordinasi, menindaklanjuti sebanyak 14 (empat belas) kasus pengaduan yaitu :

NO	PELAYANAN	TINDAK LANJUT	KET
1.	Kasus Pengaduan H. Gassing, wakil warga nelayan (Pagae) pendatang yang berdomisili di Kelurahan Mata Kecamatan Kendari Kota Kendari yang keberadaannya tidak disetujui oleh sebahagian warga Kelurahan Mata.	Atas pengaduan Sdr. H.Gassing, bahwaTim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), dalam melakukan rapat koordinasi. ➤ Bahwa Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ➤ Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. ➤ Sehingga jika ada yang mengklaim bahwa suatu kelompok tidak dapat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dalam wilayah NKRI, maka hal tersebut jelas melanggar hak asasi manusia.	-
2.	Kasus pengaduan Heru Istawati dalam hal ini bertindak sebagai pendamping ibu Minalia dan Nona Delfi Destiana Putri yang saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan di Polres Baruga berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh ibu Siti Marsiah. Ibu Heru memohon bantuan perlindungan hukum dalam hal ini bantuan pengacara kepada Kementerian Hukum dan HAM Sultra.	- Atas pengaduan Sdr. Heru Istawati bahwa Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS),dalam melakukan rapat koordinasi, akan menelusuri apakah pemohon memang benar-benar berasal dari keluarga yang kurang mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan hukum.	-
3.	Kasus pengaduan Asrorudin, S.KM mengadukan persetujuan terhadap	- Atas pengaduan Sdr. Asroridin S.KM bahwa Tim Pelayanan	



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

	anak dibawah umur yang dialami anaknya. Kasus ini sudah dilaporkan Polsek Baruga.	Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), dalam melakukan rapat koordinasi, tidak dapat ditindak lanjuti karena baru-baru ini bapak Asrorudin menelpon bahwa kasusnya sudah diproses di kepolisian.	
4.	Kasus pengaduan Laode Nasiru terkait mengenai kasus penyerobotan tanah miliknya yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang warga di Desa Kamosope RT.II Tompona.	- Atas pengaduan Sdr. Laode Nasiru, bahwa Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), dalam melakukan rapat koordinasi, disepakati bahwa kasus ini layak untuk ditindaklanjuti.	
5.	Kasus pengaduan Mustang mengenai instansi TNI Kendari yang meragukan berkas surat pengganti ijazah karena kebakaran yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kabupaten Kolaka.	-	
6.	Kasus pengaduan La Ampy mengenai pernikahan anaknya yang dilakukan tanpa persetujuannya.	-	
7.	Kasus pengaduan Muhammad Aras, S,AP. Mengenai putusan Pengadilan Negeri Kolaka terhadap Adi Faizal Bin Ahmad yang dinilai ada kekeliruan.	- Kasus yang diadukan oleh Sdr.Muhammad Aras , terkait dengan Putusan Tingkat PN dan PT atas nama terdakwa Faizal Bin Ahmad , dalam dua putusan tersebut tercantum identitas yang salah (bukan identitas terdakwa). Dalam KUHAP telah diatur ketentuan Putusan Pengadilan yang apabila salah satu unsurnya tidak dimuat dalam putusan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 197 ayat (1) Ktab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). - Pasal 197 ayat (2) menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (b) tersebut“ mengakibatkan putusan batal demi hukum” Putusan Pengadilan dikatakan“ Batal demi hukum” (venrecchtswege nietig atau ab initio legally null and void) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah	



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

		<p>ada (never existed) Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan Pengadilan. Mengingat pengertian “ putusan batal demi hukum “ adalah demikian menurut ilmu hukum, maka mencantumkan “ perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; sebagaimana disebutkan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah keharusan hukum yang bersifat memaksa (mandatory law atau dwingend recht), sehingga tidak boleh diabaikan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana pada setiap tingkatan peradilan (Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung).</p>	
8.	<p>Kasus Pengaduan L. Mussalat, dkk di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur , mereka merasa keberatan karena lahannya diserobot / diduduki oleh orang/sekelompok orang yang mengatas namakan dirinya sebagai pewaris, peristiwa ini ditahun 2012 sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pemerintah setempat. Namun pada tahun 2013 muncul kembali orang / kelompok orang yang kembali mengaku sebagai pewaris. Warga yang merasa keberatan kemudian melaqporkan ke Polres Kolaka, namun hingga saat ini tidak ada penanganan yang jelas.</p>	<p>Atas pengaduan Sdr. L Mussalat, bahwa Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), dalam melakukan rapat koordinasi.</p> <p>➤ Kasus telah ditelaah , layak untuk ditindak lanjuti dan telah dilakukan koordinasi dan konsultasi penyelesaian kasus di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur</p>	-
9.	<p>Kasus pengaduan Dg. Barrisi di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe terkait masalah penyerobotan lahan kebun miliknya yang berada di</p>	<p>- Atas pengaduan Sdr. Dg. Barrisi Istawati bahwa Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS),dalam melakukan</p>	-



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

	<p>Kelurahan Hopa-Hopa . Pengadu merasa heran , lahan perkebunan yang dibeli sejak tahun 1997 dan diolah sebagai kebun sampai hari ini tiba-tiba ada orang yang mengklaim sebagai miliknya padahal tanah tersebut sudah sekian lama diolah dan bahkan sudah bersertifikat.</p>	<p>rapat koordinasi, .Kasus telah ditelaah, layak untuk ditindak lanjuti dan telah dilakukan rapat kordinasi di Kecamatan Wawotobi pada tanggal 23 s/d 25 Juni 2016.</p>	
10.	<p>Kasus Pengaduan Muh. Edy Suriono,S.Pt, di Desa Tadolooyo Kec. Oheo Kabupaten Konawe Utara Sdr. Edy melaporkan pembunuhan dengan cara penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi. Kasus telah ditangani pihak kepolisian tetapi pihak korban memohon kepada Kantor Wilayah Kemenkumham agar dapat melakukan pengawalan terhadap kasus yang terjadi bahwa pelaku penembakan harus ditindak lanjuti secara hukum jangan sampai ada konspirasi karena pelaku penembakan diduga adalah oknum polisi.</p>	<p>Atas pengaduan Sdr. Muh. Edy Suriono,S.Pt bahwa Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), dalam melakukan rapat koordinasi.</p> <p>➤ Kasus telah ditelaah , layak untuk ditindak lanjuti dan telah dilakukan koordinasi dan konsultasi penyelesaian masalah.</p>	-
11.	<p>Kasus pengaduan Mardin, SP.,M.Si yang beralamat di Jalan Suprpto No.129 B Kel. Tobuha Kec. Puwatu Kota Kendari, terkait masalah perlindungan anak. Sdr. Mardin mengadukan mantan istrinya (Hariani) yang menyembunyikan anak hasil dari pernikahan mereka. Sdr. Mardin merasa keberatan dengan sikap Ny. Hariani yang membawa dan menyembunyikan anak mereka yang sempat dia tinggalkan dalam waktu yang cukup lama.</p>	<p>- Atas pengaduan Sdr. Mardin, SP., M.Si. bahwa Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS),dalam melakukan rapat koordinasi, .Kasus telah ditelaah, layak untuk ditindak lanjuti .</p>	-
12.	<p>Kasus pengaduan Ny. Hariani Syamsuddin yang beralamat di Jalan. Manunggal II No.6 Kelurahan Punggulaka Kec. Kendari Barat. Ny. Hariani mengadukan mantan suaminya (Mardin) yang selalu mengintimidasi Ny. Hariani dan keluarganya, mencemarkan nama baiknya dan menelantarkan anak mereka.</p>	<p>- Atas pengaduan Sdr. Ny. Hariani. Syamsuddin bahwa Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS),dalam melakukan rapat koordinasi, Kasus telah ditelaah, layak untuk ditindak lanjuti</p>	



13.	Kasus Pengaduan Harlin, A.Ma yang beralamat di Desa Wunduhaka, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Sdr. Harlin, menyampaikan pengaduan tentang adanya pelanggaran HAM yang dialami terkait masalah penyerobotan lahan perkebunan yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Konawe Utara.	Atas pengaduan Sdr. Harlin , A.Ma., bahwa Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), dalam melakukan rapat koordinasi. ➤ Kasus telah ditelaah , layak untuk ditindak lanjut dan telah dilakukan koordinasi dan konsultasi penyelesaian masalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">❖ Mengikutkan Sdr. Harlin dalam program transmigrasi di Kec.Oheo Kab. Konawe Utara.❖ Menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan kepemilikan lahan antaranya mengenai batas lahan.❖ Pemerintah daerah melalui Dinas Transmigrasi Bagian Hukum , Camat, Kepala Desa dan Sdr. Harlin agar kembali duduk bersama untuk membahas hal-hal teknis terkait dengan kelanjutan program pemerintah.❖ Agar dilakukan pendataan ulang bagi pemilik lahan pada lokasi transmigrasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari.	
14.	Kasus pengaduan Sdr. Ambo Sakke yang beralamat di Lasuasua Kabupaten Kolaka Utara. Sdr. Ambo Sakke melaporkan guru SMPN 2 Lasuasua atas nama Siti Ara yang diduga telah memukul seorang siswa bernama Nurdin Pandas yang tidak lain adalah anak dari Ambo Sakke karena curiga Nurdin telah mencuri uang milik ibu guru Siti Ara.	- Atas pengaduan Sdr. Mardin, SP., M.Si. bahwa Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS),dalam melakukan rapat koordinasi, .Kasus telah ditelaah, layak untuk ditindak lanjut sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">❖ Bahwa Kepala SMPN 2 Lasusua membenarkan adanya peristiwa pemukulan seorang siswa yang dilakukan oleh bawahannya.❖ Bahwa permasalahan ini telah mendapatkan perhatian dari Kepala SMPN 2 Lasuasua yaitu dengan memberikan teguran kepada guru yang bersangkutan.❖ Bahwa ibu guru Siti Ara telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya menyampaikan permohonan	



		maaf serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. 6. Bahwa Kepala SMPN 2 Lasusua berharap agar peristiwa ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan aparat penegak hukum.	
15.	Kasus pengaduan Sdr. Mardin yang telah dilaksanakan di triwulan III kembali dilakukan rapat koordinasi karena Sdr. Mardin merasa kurang puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian yang hingga sekarang belum melakukan pemanggilan terhadap terlapor Sdr. Darmansyah Nahru untuk kasus perubahan/pergantian nama anak dari Sdr. Mardin.	- Atas pengaduan Sdr. Mardin bahwa Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), dalam melakukan rapat koordinasi, Kasus telah ditelaah, layak untuk ditindak lanjuti dengan hasil : ❖ Pihak Penyidik belum bisa menetapkan sdr. Darmansyah sebagai tersangka karena belum cukup bukti, sdr. Mardin juga belum memberikan bukti pendukung yang diminta oleh Penyidik dalam hal ini kartu keluarga semasa sdr. Mardin dan ibu Hariyani masih berstatus suami isteri.	
16.	Kasus pengaduan Sdr. Ny. Arhani yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Alo lama. Sdr. Arhani mengadukan Saudara Kandung almarhum mantan suaminya yang sepertinya dengan jelas berusaha untuk mengatur peninggalan almarhum pada hal ada anak kandung dari almarhum yang berhak atas peninggalan tersebut.	- Atas pengaduan Sdr. Mardin bahwa Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), dalam melakukan rapat koordinasi, Kasus telah ditelaah, layak untuk ditindak lanjuti dengan hasil : ❖ Disepakati bahwa peninggalan almarhum Laode Ewin yang berupa deposito yang berjumlah Rp. 25.000.000,- akan dibagi dengan pembagian sebagai berikut ; ❖ Untuk Waode Indah mendapatkan Rp. 10.000.000,- ❖ Kedua orang anak dari isteri I (pertama) almarhum masing-masing mendapatkan Rp. 5.000.000,- - Untuk keperluan perbaikan makam almarhum Rp. 5.000.000,-	

Pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM dan Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu triwulan I telah melaksanakan kegiatan :



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

- a. Pelaksanaan kajian HAM , melaksanakan rapat penyusunan laporan kajian permasalahan HAM (DIPA BALITBANG HAM)
- b. Informasi HAM
- c. Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) meliputi pembuatan SK TIM YANKOMAS dan menerima serta menindak lanjuti 2 (dua) kasus pengaduan.
- d. Publikasi HAM

▪ **Bidang Pemajuan HAM**

Selain penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, Pengkoordinasian dengan instansi terkait, Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia juga melaksanakan kegiatan :

- a. Melaksanakan Diseminasi HAM
- b. Kerjasama HAM dan koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RANHAM
- c. Melaksanakan Sosialisasi Hasil Kajian HAM

NO.	Nama Kegiatan	Materi	Peserta	Moderator/ Narasumber	Waktu / tempat Pelaksanaan
1.	Diseminasi HAM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ➤ Perilaku Bullying siswa sekolah ditinjau dari prespektif HAM 	30 orang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dr. Linda Fatmawati Saleh , S.H.,M.H . ➤ Masriani , SH. ➤ La ode Nurlin (Kepala Bidang Dikmen) Dinas Pendidikan dan Olah raga kota Baubau 	Tgl 28 Januari 2016 Aula SMAN I Baubau
2.	Diseminasi HAM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendidikan dan Implementasi HAM di Indonesia ➤ Hak-hak Anak dan Perlindungannya 	30 orang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Barhaman , S.H. M.H. ➤ Arifin, SH. 	Tanggal 28 Januari 2016 Aula Diknas Wakatobi
3.	Diseminasi HAM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perilaku Bullying siswa sekolah ➤ Hak Anak mendapatkan Pendidikan 	30 orang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cipta Sembiring, S.H., M.H. ➤ Isnaryati, S.H. ➤ H.Iskandar, S.Ps.,Mpd. (Kabid Dikmen) dinas pendidikan Olahraga Kab.Kolaka 	Tgl 28 Januari 2016 Aula Diknas Kab.Kolaka



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

4.	Diseminasi HAM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masyarakat ekonomi ASEAN dalam persfektif HAM ➤ Bantuan Hukum 	30 orang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sunyoto, SH. M.H ➤ Karmi, S.H. ➤ Ir. Ludin M.Si. (Kabid Dikmen) Dinas Pendidikan dan olahraga Kab.Konawe. 	Tgl 28 Januari 2016 Aula Diknas Kab.Konawe
5.	Koordinasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM Prov.Sultra	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Presiden No.75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ➤ Teknis Penyusunan Rencana Aksi HAM Daerah (penerapan norma dan standar HAM) ➤ Monitoring evaluasi dan pelaporan implementasi RANHAM tahun 2016 	40 orang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Agus Purwanto, BA, S.H., M.Si. (Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM) ➤ Tomang Pasaribu, S.H.,M.H. (Kepala Divisi Pelayanan Hukum) ➤ Sunyoto, S.H. M.H (Kabid HAM Kanwil Sultra) 	Tgl 1 Juni 2016 Ruang rapat Kantor Gubernur Prov. Sultra
6.	Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Program			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Yusriyanto, SH, Msi.(Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Prov.Sultra) 	Tgl 18 Mei 2016 Aula Kanwil Kemenkum HAM Sultra Tgl 6 s/d 8 Juni 2016 Direktorat Jenderal HAM Tgl 8 s/d 10 Juni 2016 Direktorat Jenderal HAM
7.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM II di Prov.Sultra	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Aksi Nasional HAM bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2015-2019 berdasarkan Perpres No.75 Tahun 2015 - Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Daerah (Upload Pelaporan B06) - Teknis Penyusunan RANHAM Daerah 	40 orang dari SKPD Prov.Sultra	<ul style="list-style-type: none"> -Agus Purwanto, BA., S.H.,M.Si (Kepala Kantor Wilayah) - Toman Pasaribu, S.H.,M.H (Kepala Divisi Pelayanan Hukum) -Sunyoto,S.H.,M.H.,.(Kepala Bidang HAM Kanwil KemenkumHam Sultra) -Moderator > Efendi Kalmuddin, SH.MH (Kepala Biro Hukum Prov.Sultra) 	Kantor Gubernur 26 Juli 2016

8.	Pelaksanaan Verifikasi Usulan Kabupaten/Kota Peduli HAM I (Pertama)	- Permen No.23/2013 tentang YANKOMAS (tujuan, sasaran, program aksi daerah) - Permen No.25/2013 tentang criteria Kab/Kota peduli HAM T.A 2016	30 org	- Toman Pasaribu, S.H.,M.H (Kepala Divisi Pelayanan Hukum) -Sunyoto,S.H.,M.H.,(Kepala Bidang HAM Kanwil KemenkumHam Sultra)	Aula Kanwil kemenkumHam Sultra. Tanggal 31 Agustus 2016
9.	Pelaksanaan Verifikasi Usulan Kabupaten/Kota Peduli HAM II (Kedua)	- Permen No.25/2013 tentang criteria Kab/Kota peduli HAM T.A 2016	30 org	- Yusrianto, S.H.,M.H.(Kabag Hukum Setda Prov.Sultra) - Sunyoto,S.H.,M.H.,(Kepala Bidang HAM Kanwil KemenkumHam Sultra)	Aula Kanwil kemenkumHam Sultra. Tanggal 31 Agustus 2016.

C. DIVISI KEIMIGRASIAN

1. Pelayanan SPRI

Data pelayanan, pemberian SPRI dari 3 Kantor Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2016 yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Kendari, Kantor Imigrasi Kelas III Baubau dan Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi meliputi Pemberian Paspor RI 48 halaman dan Pemberian Paspor RI 24 halaman yang masing-masing menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan rincian sebagaimana table berikut ini :

No	Bulan	Tahun 2016		Tahun 2015		Peningkatan	
		Paspor RI 48 hal	Paspor RI 24 hal	Paspor RI 48 hal	Paspor RI 24 hal	Paspor RI 48 hal	Paspor RI 24 hal
1.	Triwulan I	2.557	55	2.090	19	82%	35%
2.	Triwulan II	2.166	62	1.843	9	85%	15%
3.	Triwulan III	2.879	55	2.687	56	93%	102%
4.	Triwulan IV	3.274	79	2.176	81	66%	103%
Jumlah		10.876	251	8.796	165	81%	66%

Dengan rincian masing-masing Kantor Imigrasi sebagai berikut :

Kantor Imigrasi Kelas I Kendari

No	Bulan	Tahun 2016		Tahun 2015		Peningkatan	
		Paspor RI 48 hal	Paspor RI 24 hal	Paspor RI 48 hal	Paspor RI 24 hal	Paspor RI 48 hal	Paspor RI 24 hal
1.	Triwulan I	1.948	17	1.621	16	83%	94%
2.	Triwulan II	1.666	43	1.145	4	69%	9%
3.	Triwulan III	2.057	44	1.819	36	88%	82%
4.	Triwulan IV	2.429	59	1.406	41	58%	69%
Jumlah		8.100	163	5.991	97	74%	60%

Kantor Imigrasi Kelas III Baubau

No	Bulan	Tahun 2016		Tahun 2015		Peningkatan	
		Paspor RI 48 hal	Paspor RI 24 hal	Paspor RI 48 hal	Paspor RI 24 hal	Paspor RI 48 hal	Paspor RI 24 hal
1.	Triwulan I	504	0	350	0	69%	0%
2.	Triwulan II	448	0	560	0	125%	0%
3.	Triwulan III	723	0	731	0	101%	0%
4.	Triwulan IV	725	1	665	0	92%	0%
Jumlah		2.400	1	2.306	0	96%	0%

Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi

No	Bulan	Tahun 2016		Tahun 2015		Peningkatan	
		Paspor RI 48 hal	Paspor RI 24 hal	Paspor RI 48 hal	Paspor RI 24 hal	Paspor RI 48 hal	Paspor RI 24 hal
1.	Triwulan I	105	38	119	3	-12%	8%
2.	Triwulan II	52	19	138	5	-62%	26%
3.	Triwulan III	99	11	137	20	-28%	-55%
4.	Triwulan IV	120	19	105	40	14%	-48%
Jumlah		376	87	499	68	-88%	-69%

2. Pelayanan KITAS/ITAP

Data pelayanan, pemberian ITAS dari selama tahun 2016 di tiga unit pelaksana teknis keimigrasian (Kantor Imigrasi Kelas I Kendari, Kantor Imigrasi Kelas III Baubau dan Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi) menunjukkan **peningkatan 20,80% untuk KITAS** dan **Penurunan 50% untuk perpanjangan KITAS** jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan rincian sebagaimana ditunjukkan dengan Tabel berikut :

Tabel jumlah pemberian KITAS dilingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

NO	TAHUN	PELAYANAN		KETERANGAN
		KITAS	PERPANJANG KITAS	
1	3	4	5	6
I	Tahun 2015	62	10	-
	Tahun 2016	170	5	-
Jumlah		232	15	

Tabel jumlah pemberian KITAS per Kantor Imigrasi dilingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

TRIWULAN	UNIT/SATKER	BULAN	PELAYANAN		KETERANGAN
			KITAS	PERPANJANG KITAS	
1	2	3	4	5	6
I	KANIM KELAS I KENDARI	Januari s/d Maret 2015	62	10	-
		Januari s/d Maret 2016	170	5	-
	KANIM KELAS III BAUBAU	Januari s/d Maret 2015	0	0	-
		Januari s/d Maret 2016	6	0	-
	KANIM KELAS III WAKATOBI	Januari s/d Maret 2015	0	0	-
		Januari s/d Maret 2016	3	0	-
II	KANIM KELAS I KENDARI	April s/d Juni 2015	55	3	-
		April s/d Juni 2016	109	8	-
	KANIM KELAS III BAUBAU	April s/d Juni 2015	5	0	-
		April s/d Juni 2016	1	6	-
	KANIM KELAS III WAKATOBI	April s/d Juni 2015	0	0	-
		April s/d Juni 2016	0	0	-
III	KANIM KELAS I KENDARI	Juli s/d September 2015	215	22	-
		Juli s/d September 2016	128	10	-
	KANIM KELAS III BAUBAU	Juli s/d September 2015	8	0	-
		Juli s/d September 2016	2	9	-
	KANIM KELAS III WAKATOBI	Juli s/d September 2015	0	0	-
		Juli s/d September 2016	1	1	-
IV	KANIM KELAS I KENDARI	Oktober s/d Desember 2015	69	5	-
		Oktober s/d Desember 2016	88	3	-
	KANIM KELAS III BAUBAU	Oktober s/d Desember 2015	6	0	-
		Oktober s/d Desember 2016	3	1	-
	KANIM KELAS III WAKATOBI	Oktober s/d Desember 2015	3	0	-
		Oktober s/d Desember 2016	0	0	-

3. Pelayanan ITK

Data Pelayanan ITK dari selama tahun 2016 di tiga unit pelaksana teknis keimigrasian (Kantor Imigrasi Kelas I Kendari, Kantor Imigrasi Kelas III Baubau dan Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi) menunjukkan **peningkatan sebesar 254,19%** jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan rincian sebagaimana ditunjukkan dengan Tabel berikut :

Tabel jumlah perpanjangan ITK dilingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

NO.	BULAN	PERPANJANGAN ITK	KET
1.	Tahun 2015	3.630	
2.	Tahun 2016	12.857	
	Jumlah	16.487	



**Tabel jumlah perpanjangan ITK per Kantor Imigrasi dilingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara**

TRIWULAN	UNIT/SATKER	BULAN	PERPANJANGAN ITK	KET
I	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	Januari s/d Maret 2015	71	
		Januari s/d Maret 2016	1.899	
	Kantor Imigrasi Kelas III Baubau	Januari s/d Maret 2015	5	
		Januari s/d Maret 2016	14	
	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	Januari s/d Maret 2015	0	
		Januari s/d Maret 2016	14	
II	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	April s/d Juni 2015	85	
		April s/d Juni 2016	805	
	Kantor Imigrasi Kelas III Baubau	April s/d Juni 2015	35	
		April s/d Juni 2016	32	
	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	April s/d Juni 2015	79	
		April s/d Juni 2016	0	
III	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	Juli s/d September 2015	85	
		Juli s/d September 2016	2425	
	Kantor Imigrasi Kelas III Baubau	Juli s/d September 2015	82	
		Juli s/d September 2016	49	
	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	Juli s/d September 2015	17	
		Juli s/d September 2016	47	
IV	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	Oktober s/d Desember 2015	3105	
		Oktober s/d Desember 2016	7.547	
	Kantor Imigrasi Kelas III Baubau	Oktober s/d Desember 2015	66	
		Oktober s/d Desember 2016	24	
	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	Oktober s/d Desember 2015	0	
		Oktober s/d Desember 2016	1	

4. Lalulintas Orang Asing

Data lalu lintas orang (WNI dan WNA) dari dan ke luar negeri melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) laut dan Udara di Kendari sebagai berikut:

**Tabel Data lalu lintas orang (WNI dan WNA) dari dan ke luar negeri
melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara**

NO	BULAN	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI				KET
		MASUK		KELUAR		
		WNI	WNA	WNI	WNA	
I	Tahun 2015	241	514	84	592	Crew Kapal
	Tahun 2016	518	933	94	530	Crew Kapal
Peningkatan/Penurunan		115%	82%	12%	-10%	

Tabel Data lalu lintas orang (WNI dan WNA) dari dan ke luar negeri
melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi per Kantor Imigrasi di Lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

TRIWULAN	UNIT/ SATKER	BULAN	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI				KET
			MASUK		KELUAR		
			WNI	WNA	WNI	WNA	
I	KANIM KELAS I KENDARI	Januari s/d Maret 2015	8	101	8	101	Crew Kapal
		Januari s/d Maret 2016	15	108	15	108	Crew Kapal
	KANIM KELAS III BAUBAU	Januari s/d Maret 2015	0	0	0	0	Crew Kapal
		Januari s/d Maret 2016	112	107	-	26	Crew Kapal
	KANIM KELAS III WAKATOBI	Januari s/d Maret 2015	0	0	0	0	Crew Kapal
		Januari s/d Maret 2016	0	0	0	0	Crew Kapal
II	KANIM KELAS I KENDARI	April s/d Juni 2015	-	22	-	49	Crew Kapal
		April s/d Juni 2016	1	36	1	36	Crew Kapal
	KANIM KELAS III BAUBAU	April s/d Juni 2015	72	51	24	105	Crew Kapal
		April s/d Juni 2016	167	89	27	24	Crew Kapal
	KANIM KELAS III WAKATOBI	April s/d Juni 2015	0	0	0	0	Crew Kapal
		April s/d Juni 2016	0	0	0	0	Crew Kapal
III	KANIM KELAS I KENDARI	Juli s/d September 2015	4	75	4	75	Crew Kapal
		Juli s/d September 2016	12	63	12	63	Crew Kapal
	KANIM KELAS III BAUBAU	Juli s/d September 2015	107	83	24	58	Crew Kapal
		Juli s/d September 2016	85	79	0	0	Crew Kapal
	KANIM KELAS III WAKATOBI	Juli s/d September 2015	0	0	0	0	Crew Kapal
		Juli s/d September 2016	0	0	0	0	Crew Kapal
IV	KANIM KELAS I KENDARI	Oktober s/d Desember 2015	0	119	0	66	Crew Kapal
		Oktober s/d Desember 2016	34	243	14	229	Crew Kapal
	KANIM KELAS III BAUBAU	Oktober s/d Desember 2015	50	63	24	138	Crew Kapal
		Oktober s/d Desember 2016	92	208	25	44	Crew Kapal
	KANIM KELAS III WAKATOBI	Oktober s/d Desember 2015	0	0	0	0	Crew Kapal
		Oktober s/d Desember 2016	0	0	0	0	Crew Kapal

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang diperoleh dari sektor Keimigrasian selama Tahun 2016 sebesar Rp. **9.513.859.444** (sebilan miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh sebilan empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagaimana ditunjukkan dalam table berikut :

Tabel perolehan PNBP Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2016

NO.	SATKER	PERIODE				JUMLAH
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Kedari	1.666.975.000	1.062.140.000	1.792.545.000	3.768.230.000	8.289.890.000
	dari sewa rumah dinas	520.407	606.927	712.555	714.555	2.554.444
2.	Kantor Imigrasi Kelas III Baubau	211.090.000	187.335.000	307.825.000	336.560.000	1.042.810.000
3.	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	54.500.000	22.115.000	55.990.000	46.000.000	178.605.000
JUMLAH		1.933.085.407	1.272.196.927	2.157.072.555	4.151.504.555	9.513.859.444



6. Pelayanan Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian :

a. Klik Persetujuan Alih Status ITK ke ITAS

Klik persetujuan alih status ITK ke ITAS pada tahun 2016 sebanyak 377 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Triwulan I sebanyak 117 orang.
2. Triwulan I sebanyak 53 orang.
3. Triwulan I sebanyak 108 orang.
4. Triwulan I sebanyak 99 orang.

b. Klik persetujuan Alih Status Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) ke ITAP

Klik persetujuan alih status ITAS ke ITAP pada tahun 2016 sebanyak 1 orang yaitu pada Triwulan ke IV sedangkan pada Triwulan I, II dan III jumlahnya nihil.

c. Pengawasan Keimigrasian

1. Divisi Keimigrasian

- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan peringatan Hari Bakti Imigrasi yang ke-66 serta melakukan koordinasi dan konsultasi tentang anggaran pembelian rumah dinas pada Divisi Keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 13 s/d 15 Januari 2016 sesuai surat perintah Nomor : W25-05.GR.03.03 Tahun 2016;
- Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepegawaian teknis Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi pada tanggal 27 s/d 29 Januari 2016, sesuai surat perintah Nomor :W25-61.KP.05.02 Tahun 2016.
- Melaksanakan kegiatan Pembinaan, koordinasi dan konsultasi Bidang Intelijen, penindakan dan sarana komunikasi Keimigrasian di Kabupaten Kolaka pada tanggal 03 s/d 05 Februari 2016 sesuai surat perintah Nomor :W25-11.GR.04.02 Tahun 2016;
- Mengikuti Rapat Kerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016 pada tanggal 21 s/d 24 Februari 2016 sesuai surat perintah Nomor : W25-19.PR.01.02 Tahun 2016 ;
- Melaksanakan kegiatan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas di Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal dan status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas III Baubau pada tanggal 24 s/d 26 Februari 2016 sesuai surat perintah Nomor : W25.GR.04.01 Tahun 2016;
- Mengikuti rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di gedung pertemuan Soekarno Hatta BIN pada tanggal 22 s/d 24 Januari 2016 sesuai surat perintah Nomor : W25-30.GR.03.03 Tahun 2016;



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

*Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340*

- Mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017 pada tanggal 02 s/d 04 Maret 2016 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta Jln. Prapatan sesuai surat perintah Nomor :W25-50.UM.01.03 Tahun 2016;
- Mengikuti Rapat Koordinasi Penegakan Hukūm Keimigrasian Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 23 s/d 25 Februari 2016 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Jl. Lapangan Banteng Selatan sesuai surat perintah Nomor : W25-46.UM.01.03 Tahun 2016.
- Pada triwulan II melakukan Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing pada tanggal 31 Mei s/d 02 Juni 2016 di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, sesuai surat perintah Nomor : W25-70.GR.03.02 tanggal 25 Mei 2016;
- Melakukan Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi dibidang Intelejen pada tanggal 07 s/d 09 Agustus 2016 di Kabupaten Wakatobi, sesuai surat perintah Nomor : W25-246.UM.01.03 ;
- Melakukan Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing pada tanggal 24 s/d 26 Agustus 2016 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai surat perintah Nomor : W25-95.GR.03.02;
- Mengikuti undangan rapat dan pelaksanaan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian pada tanggal 14 s/d 16 september 2016 diKantor Imigrasi Kelas III Baubau, sesuai surat perintah Nomor : W25-112.GR.04.02 ;
- Mengikuti Rapat Pembentukan Sekretariat TIMPORA pada tanggal 21 s/d 23 September 2016 di Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi, sesuai surat perintah Nomor : W25-115.GR.02.01;
- Melakukan Pembinaan Kepegawaian Teknis Keimigrasian pada tanggal 22 s/d 24 September 2016 di Kantor Kelas III Wakatobi, sesuai surat perintah Nomor : W25-489.KP.05.03;
- Menghadiri rapat Koordinasi dalam rangka Operasi serentak diKantor Imigrasi Kelas I Kendari tanggal 26 Oktober Tahun 2016 sesuai surat perintah Nomor : W25-138.GR.04.01 Tahun 2016 ;
- Melakukan Operasi Pengawasan serentak bersama Kantor Imigrasi Kelas I Kendari pada tanggal 27 Oktober 2016 sesuai surat perintah Nomor : W25-139.GR.04.01 Tahun 2016;
- Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepegawaian Teknis Keimigrasian di Bidang Intelejen Kantor Imigrasi Kelas III Baubau pada tanggal 02 s/d 04 November 2016 sesuai surat perintah Nomor : W25-142.GR.03.05-142 ;
- Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepegawaian Teknis Keimigrasian di Bidang Intelejen Kantor Imigrasi Kelas III Baubau pada tanggal 28 s/d 30 November 2016 sesuai surat perintah Nomor : W25-142.GR.03.05-161 tahun 2016 ;



- Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepegawaian Teknis Keimigrasian di Bidang Intelejen Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi pada tanggal 01 s/d 03 Desember 2016 sesuai surat perintah Nomor : W25-142.GR.03.05-162 tahun 2016 ;
- Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepegawaian Teknis Keimigrasian di Bidang Lalulintas Ijin tinggal dan status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi pada tanggal 01 s/d 03 Desember 2016 sesuai surat perintah Nomor : W25-142.GR.03.05-164 tahun 2016 ;
- Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepegawaian Teknis Keimigrasian di Bidang Lalulintas Ijin tinggal dan status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi pada tanggal 28 s/d 30 November 2016 sesuai surat perintah Nomor : W25-142.GR.03.05-164 tahun 2016 ;
- Melaksanakan Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 14 s/d 16 Desember 2016 sesuai surat perintah Nomor : W25.169.GR.03.02 Tahun 2016.
- Melaksanakan Pembinaan Teknis Keimigrasian terkait pelayanan peningkatan kualitas pelayanan Keimigrasian dan evaluasi kinerja terkait pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Kendari tanggal 08 Desember 2016 sesuai surat perintah Nomor ; W25.180.GR.43.02;
- Melaksanakan Pengawasan orang Asing di Kabupaten Konawe selama 1 hari tanggal 23 Desember sesuai surat perintah nomor ; W25-GR.01.03-187 tahun 2016.

2. Kantor Imigrasi Kelas I Kendari

- Tanggal 19 s/d 21 Januari 2016 melakukan tugas pengawasan keberadaan dan kegiatan orang Asing di Kabupaten Kolaka sesuai Surat Perintah Nomor : W25.IMI.-GR.02.01-095;
- Tanggal 03 s/d 05 Maret 2016 melakukan Tugas pengawasan Keberadaan dan kegiatan orang Asing di Kabupaten Konawe Utara sesuai surat perintah Nomor : W25.IMI.GR.02.01-0284;
- Tanggal 11 s/d 12 Maret 2016 melakukan Tugas Pengawas Keberadaan dan Kegiatan orang Asing di Kabupaten Kolaka sesuai surat perintah Nomor : W25.IMI.I-GR.02.01-0320.
- Melakukan Pengawasan Keberadaan dan Kegiatan orang asing di Kabupaten Kolaka dan Konawe pada tanggal 30 Mei 2016, sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.1-GR.02.01 Tahun 2016.
- Pada tanggal 12 s/d 17 Juli 2016 melakukan tugas Operasi Intelejen Keimigrasian di Kabupaten Kolaka Utara , sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.1-GR.02.01-0728 Tahun 2016;
- Pada tanggal 18 s/d 20 Agustus 2016 melakukan Rapat Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Kolaka, sesuai surat Perintah Nomor : W25-IMI.1-UM.02.07-0844 Tahun 2016;



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

*Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340*

- Pada tanggal 24 s/d 26 Agustus 2016 melakukan tugas Pengawasan kegiatan dan keberadaan Orang Asing di Kabupaten Kolaka, sesuai surat Perintah Nomor : W25-IMI.1-GR.02.01-0853 Tahun 2016;
- Pada tanggal 07 s/d 09 September 2016 melakukan tugas Rapat Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bombana, sesuai surat Perintah Nomor : W25-MI.UM. 02.07-0918;
- Pada tanggal 19 s/d 21 September 2016 melakukan tugas Pengawasan kegiatan dan keberadaan Orang Asing di Kabupaten Konawe , sesuai surat Perintah Nomor : W25-IMI.1-GR.02.01-0853 Tahun 2016;
- Periode Juli s/d September 2016 telah dilakukan penindakan Keimigrasian pemegang SPRI karena hilang sebanyak 11 (sebelas) orang, pendeportasian 3 (tiga) orang WNA keluar wilayah Indonesia.
- Pada tanggal 04 s/d 06 Oktober 2016 melakukan tugas Pengawasan orang Asing di wilayah Kab.Konawe Selatan, sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.1-GR.02.01-1043 Tahun 2016;
- Pada tanggal 10 s/d 14 Oktober 2016 melakukan Pengawasan orang Asing di wilayah Kota Kendari, sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.1-GR.02.01-1029 Tahun 2016;
- Melakukan Pengawasan orang Asing di wilayah Kab. Konawe Selatan, sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.1-GR.02.01-1043 Tanggal 13 s/d 15 Oktober Tahun 2016;
- Melakukan Pengawasan Serentak Kegiatan dan Keberadaan orang Asing di Kota Kendari, sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.1-GR.02.01-1082 Tanggal 27 s/d 28 Oktober Tahun 2016;
- Melakukan Tugas Pengawasan orang Asing di wilayah Kab.Kolaka, sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.1-GR.02.01-1231 Tanggal 7 s/d 9 Desember Tahun 2016;
- Melakukan Tugas Pengawasan orang Asing di wilayah Kab.Kolaka Utara, sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.1-GR.02.01-1244 Tanggal 13 s/d 15 Desember Tahun 2016

3. Kantor Imigrasi Kelas III Baubau

- Tanggal 24 s/d 26 Februari 2016 melakukan pengawasan orang Asing di di Raha sesuai surat perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Baubau Nomor: W25.IMI.3GR.02.01.40 tanggal 29 s/d 2 Maret 2016
- Melakukan Pengawasan orang Asing di Raha sesuai surat perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Baubau Nomor : W25.IMI.3-GR.02.01.41.
- Melakukan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Buton Tengah sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.GR.02.01-126.a tanggal 31 Mei 2016;
- Pada tanggal 09 s/d 11 Agustus 2016 melakukan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Muna sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.3.GR.02.01-180;



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

*Jalan Balai Kota No. 7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340*

- Pada tanggal 19 s/d 21 Agustus 2016 melakukan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Buton sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.3.GR.02.01-199;
- Pada tanggal 14 s/d 16 September 2016 melakukan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten BauBau sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.3.GR.02.01-305
- Pada tanggal 14 Oktober 2016 melakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian WNA di wilayah kerja Kanim Kelas III Baubau dalam rangka gerakan serentak penegakan hukum Keimigrasian Tahap I sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.3.GR.02.01-392;
- Pada tanggal 27 Oktober 2016 melakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian WNA di wilayah kerja Kanim Kelas III Baubau tahap II Nomor :W25-IMI.3.GR.02.01-400;
- Pengumpulan bahan keterangan, data dan informasi dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan /pengawasan /intelijen Keimigrasian dan koordinasi di Kab. Buton Utara tanggal 18 s/d 20 November 2016 sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.3.GR.02.01-438.
- Melaksanakan tugas pengumpulan bahan keterangan data dan informasi dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan /pengawasan Orang Asing di Kab. Buton tanggal 21 s/d 23 November sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.3.GR.02.01-440.
- Melaksanakan tugas pengumpulan bahan keterangan data dan informasi dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan /pengawasan/intelijen Keimigrasian dan Koordinasi dengan instansi terkait di Kab. Buton tanggal 24 s/d 26 November sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.3.GR.02.01-441.
- Melaksanakan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian Sulawesi Tenggara dan operasi pemantauan Keimigrasian di Kab. Muna tanggal 09 s/d 11 Desember 2016 sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.3.GR.02.01-474
- Melaksanakan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian Sulawesi Tenggara dan operasi pemantauan Keimigrasian di Kab. Bombana tanggal 13 s/d 16 Desember 2016 sesuai surat perintah Nomor :W25-IMI.3.GR.02.01-481.

4. Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi

- Untuk periode Januari sampai dengan Maret 2016 Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi belum melakukan kegiatan Pengawasan Orang Asing.
- Melakukan Pengawasan Rutin di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi yang dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 03 Mei 2016 sesuai dengan surat perintah tugas : W25-IMI. 2-GR.02.01-36 Tahun 2016 ;
- Operasi gabungan yang dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi pada tanggal 31 Mei s/d 01 Juni 2016 sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : W25.IMI.2.GR.02,01-46.
- Melakukan Pengawasan Rutin di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi yang dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 10 Agustus 2016 sesuai dengan surat perintah tugas : W25-IMI. 2-GR.02.01-55 Tahun 2016 ;



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

*Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340*

- Pengawasan Orang Asing yang dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Wokatobi pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2016 sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : W25.IMI.2.GR.02.01-56
- Pengawasan Orang Asing yang dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Wokatobi pada tanggal 05 s/d 07 September 2016 sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : W25.IMI.2.GR.02.01-63.
- Melakukan Pengawasan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas III Wokatobi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 sesuai dengan surat perintah tugas : W25-IMI. 2-GR.02.01-75 Tahun 2016 ;
- Melakukan Pengawasan Orang Asing yang dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Wokatobi pada tanggal 19 Oktober 2016 sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : W25.IMI.2.GR.02.01-76
- Pengawasan Orang Asing yang dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Wokatobi pada tanggal 26 Oktober 2016 sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : W25.IMI.2.GR.02.01-77.
- Pengawasan Orang Asing yang dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Wokatobi pada tanggal 02 Desember 2016 sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : W25.IMI.2.GR.02.01-86.

d. Penindakan Keimigrasian

1. Kantor Imigrasi Kelas I Kendari

- Kantor Imigrasi Kelas I Kendari telah melakukan pemeriksaan pemegang SPRI karena hilang dan rusak sebanyak :
 - Triwulan I : 15 orang,
 - Triwulan II : 6 orang,
 - Triwulan III : 6 orang,
 - Triwulan IV : 25 orang
- Melakukan tindakan Keimigrasian pendeportasian WNA keluar wilayah Indonesia sebanyak :
 - Triwulan I : 7 orang
 - Triwulan II : 2 orang
 - Triwulan III : 2 orang
 - Triwulan IV : 3 orang

serta melakukan penindakan terhadap imigran ilegal dari berbagai kebangsaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap UU.No.6 Tahun 2011 .



2. Kantor Imigrasi Kelas III Baubau

- Kantor Imigrasi Kelas III Baubau telah dilakukan pemeriksaan pemegang SPRI karena hilang dan rusak sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pada triwulan I, dan melakukan tindakan Keimigrasian Pendeportasian 2 (dua) orang WNA keluar wilayah Indonesia.
- Triwulan II Tahun 2016, telah dilakukan pemeriksaan pemegang SPRI karena hilang dan rusak sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
- Triwulan III Tahun 2016, telah dilakukan pemeriksaan pemegang SPRI karena hilang dan rusak sebanyak 45 (empat puluh lima) orang,
- Triwulan IV Tahun 2016, telah dilakukan pemeriksaan pemegang SPRI karena hilang dan rusak sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang, dan rusak sebanyak 19 (sembilan belas) orang

3. Kantor Imigrasi Kelas III WAKATOBI

- Triwulan I dan Triwulan II tahun 2016, tidak terdapat pemegang SPRI yang hilang atau rusak dan tidak terdapat pelanggaran keimigrasian yang membutuhkan tindakan pendeportasian sesuai dengan UU.No. 6 Tahun 2011 .
- Triwulan III tahun 2016, pemeriksaan pemegang SPRI karena hilang dan rusak sebanyak 4 (empat) orang.
- Triwulan IV tahun 2016, pemeriksaan pemegang SPRI karena hilang dan rusak sebanyak 1 (satu) orang.

D. DIVISI PEMASYARAKATAN

1. Pelayanan Tahanan

Dalam proses pra adjudikasi, seorang tahanan yang didakwa melakukan pelanggaran hukum, diperlakukan berdasarkan prinsip praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Penempatan seorang tahanan harus dipisahkan dengan orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan (Narapidana). Lapas Baubau yang ada saat ini selain berfungsi sebagai tempat pembinaan (LAPAS), juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan (Rutan). Kondisi yang demikian Lapas Baubau tidak melebihi daya tampung (Tidak Over Kapasitas) penghuni terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Keadaan Jumlah Penghuni Napi / Tahanan pada Lapas / Rutan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun periode Oktober s/d Desember 2015 sebagai berikut:



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

No	Nama UPT	KAP	NARAPIDANA			TAHANAN			JML
			L	W	JML	L	W	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LP KENDARI	404	402	28	430	10	-	10	440
2	LP BAUBAU	520	298	14	312	111	-	111	423
3	RT KENDARI	300	135	20	155	195	23	218	373
4	RT KOLAKA	150	151	3	154	105	6	111	265
5	RT RAHA	210	95	-	95	74	5	79	174
6	RT UNAAHA	300	169	2	171	87	4	91	262
TOTAL		1.884	1.250	67	1.317	582	38	620	1.937

Apabila jumlah penghuni Narapidana dan Tahanan di atas dirinci berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut :

a.	Narapidana / Tahanan Narkoba	:	441	Orang			
b.	Narapidana / Tahanan Anak	:	49	Orang			
c.	Narapidana / Tahanan Wanita	:	93	Orang			
d.	Narapidana Hukuman Mati	:	-	Orang			
e.	Narapidana Hukuman Seumur Hidup	:	6	Orang			
f.	Napi / Tahanan WNA	:	-	Orang			
g.	Napi / Tahanan Kasus Pidana Umum	:	1.157	Orang			
h.	Napi / Tahanan Residivis	:	191	Orang			

2. Pembinaan Narapidana

over kapasitas menjadi masalah yang secara umum terjadi di Lapas/Rutan se Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini :

No	Nama UPT	KAP	JML WBP	Jumlah Petugas Pengamanan/Regu	Perbandingan
1	2	3	4	5	6
1	LP KELAS IIA KENDARI	404	440	1 regu : 8 org x 4 regu = 32 Org	1 : 50
2	LP KELAS IIA BAUBAU	520	423	1 regu : 8 org x 4 regu = 32 Org	1 : 59
3	RT KELAS IIA KENDARI	300	473	1 regu : 10 org x 4 regu = 40 Org	1 : 54
4	RT KELAS IIB KOLAKA	150	265	1 regu : 5 org x 4 regu = 20 Org	1 : 46
5	RT KELAS IIB RAHA	210	174	1 regu : 7 org x 4 regu = 28 Org	1 : 27
6	RT KELAS IIB UNAAHA	300	262	1 regu : 6 org x 4 regu = 24 Org	1 : 25
TOTAL		1.884	1.937	-	-

Melihat keadaan Lapas / Rutan dalam kondisi **over kapasitas**, upaya-upaya pembinaan terhadap narapidana harus ditingkatkan. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan over kapasitas melalui percepatan pemberian PB, CB dan CMB berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan PP No. 28 Tahun 2006 dan perubahan kedua Permen No.21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Data pemberian PB, CB dan CMB dapat disampaikan sebagai berikut :



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

No	BULAN	PEMBERIAN HAK-HAK WBP			KETERANGAN
		PB	CB	CMB	
1	2	3	4	5	6
1	JANUARI	39	36	3	
2	FEBRUARI	29	35	3	
3	MARET	-	-	-	
4	APRIL	-	-	-	0
5	MEI	-	-	-	0
6	JUNI	-	-	-	0
7	JULI	39	26	6	0
8	AGUSTUS	32	31	-	0
9	SEPTEMBER	31	22	1	0
10	OKTOBER	30	48	-	0
11	NOPEMBER	38	41	-	0
12	DESEMBER	33	43	-	0
TOTAL		271	282	13	

3. Pembinaan Klient

Tugas pembinaan terhadap warga binaan pemsyarakatan (klien Pemsyarakatan) diimban dan menjadi tanggungjawab Balai Pemsyarakatan Kelas II Kendari dan Bapas Kelas II Baubau dengan wilayah kerja mencakup :

1. Bapas Kelas II Kendari mencakup Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Konawe, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Selatan
2. Bapas Kelas II Baubau mencakup Kota Baubau, Kab. Buton, Kab. Muna, Kab. Buton Utara, Kab. Wakatobi dan Kab. Bombana

Keadaan klien Pemsyarakatan pada Bapas Kelas II Kendari dan Bapas Kelas II Baubau apabila dirinci berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Bapas Kendari	Bapas Bau-Bau
1	2	3	4
1	Anak yang diputus Hakim untuk dipulangkan ke Orang Tua / Wali	-	13
2	Anak yang diputus Hakim menjadi Anak Negara (AN)	-	-
3	Pidana Bersyarat	3	-
4	Pembebasan Bersyarat (PB)	469	215
5	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	5	1
6	Cuti Bersyarat (CB)	46	27
7	Litmas untuk Pengadilan Negeri	-	-
8	Litmas untuk Pembinaan Luar Lapas	14	-
9	Sidang Anak Pengadilan Negeri	-	-
10	Assimilasi	-	-
11	Litmas untuk Kepolisian	0	0
TOTAL		537	256

4. Perawatan Basan / Baran

Untuk kepentingan proses peradilan, barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan disita dan disimpan di Rupbasan dengan rincian sebagai berikut .

NO	NAMA BASAN/BARANG	JUMLAH	STATUS	KET
1	2	3	4	5
1	1 (satu) unit mobil jenis suzuki Futura No.Pol. DT. 1762 CE yang telah terbakar	1 unit	Kejaksanaan	Baik
2	2 (Dua) lembar potongan tripleks yang terbuat dari kayu yang telah terbakar	2 lembar	Kepolisian	Baik
3	1 (satu) unit mobil jenis Izusu fanther warna biru DT. 7833 BA serta kunci kontak mobil tersebut	1 unit	Kejaksanaan	Baik
4	1 (satu) lembar STNK No. 0032503/SR/2009	1 lembar	Kejaksanaan	Baik
5	33 (tiga puluh tiga) buah jergen masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar	33 buah	Kejaksanaan	Baik
6	7 (tujuh) buah jergen masing – masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang kosong	7 buah	Kepolisian	Baik
7	6 (enam) buah jergen masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar	6 buah	Kepolisian	Baik
8	1 (satu) unit mobil merk fanther pickup warna merah DT. 8340 AE serta 2 (dua) buah tangki rakitan yang terdiri tangki duduk yang berada disamping sopir dan tangki yang berada d bawah bak mobil serta kunci kontak mobil tersebut serta kunci kontak mobil tersebut	1 unit	Kepolisiam	Baik
9	1 (satu) lembar STNK No. 0011351/SR/2002	1 lembar	Kejaksanaan	Baik
10	2 (dua) buah potongan selang	2 buah	Kejaksanaan	Baik
11	4 (empat) buah jergen masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar	4 buah	Kejaksanaan	Baik
12	1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha DT. 5416 DH dalam kondisi rusak total tanpa surat -surat	1 unit	Kepolisian	Baik
13	1 (satu) unit mobil jeep merk taft tipe Daihatsu warna hijau metalik DT. 7725 DB serta kunci kontak mobil tanpa surat-surat	1 unit	Kejaksanaan	Baik
14	1 (satu) buah jergen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yg berisikan bahan bakar minyak jenis solar	1 buah	Kejaksanaan	Baik
15	1 (satu) unit mobil pick Mitshubishi iL300 PUFB warna hitam dengan Nomor Polisi DT.8325 CA nomor rangka MHMLOPU398K0 1832 Nomor Mesin: 4D56C-D24253 lengkap dengan kunci kontak	1 unit	Kepolisian	Baik
16	1 (satu) lembar STNK Nomor polisi DT. 8325 CA An. Herman Ahmad	1 lembar	Kejaksanaan	Baik
17	33 (Tiga Puluh Tiga) Jerigen BBM Jenis Solar	33 jergen	Kepolisian	Baik
18	1 (satu) unit body batang	1 unit	Kejaksanaan	Baik
19	1 (satu) buah mesin katinting	1 buah	Kejaksanaan	Baik
20	1 (satu) buah kaca mata selam	1 buah	Kepolisian	Baik
21	1 (satu) buah alat pernapasan	1 buah	Kejaksanaan	Baik
22	3 (tiga) buah jaring	3 tiga buah	Kejaksanaan	Baik
23	1 (satu) pasang sepatu katak	1 pasang	Kepolisian	Baik
24	2 (buah) baling-baling kapal	2 buah	Kepolisian	Baik
25	1 (satu) buah jerigen 20 (dua puluh) liter berisi bensin	1 buah	Kepolisian	Baik
26	1 (satu) unit kompresor dan	1 unit	Kepolisian	Baik
27	1 (satu) gulung selang kompresor	1 unit	Kepolisian	Baik
28	1 (satu) buah senter 1 (satu) buah palu-palu dan 1 (satu) buah benang	1 buah	Kepolisian	Baik
29	1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah dopis dan 1 (satu) botol oli	1 buah	Kepolisian	Baik
30	1 (satu) buah gabus ikan, 6 (enam) ekor ikan, 1 buah dayung	1 buah	Kepolisian	Baik



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No.7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

NO	NAMA BASAN/BARANG	JUMLAH	STATUS	KET
1	2	3	4	5
	dan 1 buah As kapal			
31	9 (sembilan) botol guienes bom ikan, dan 3 (tiga) botol cap kura bango bom ikan	9 botol	Kepolisian	Baik
32	3 (tiga) gulung obat nyamuk	3 gulung	Kepolisian	Baik
33	1 (satu) unit sepeda motor Dt. 4178 CE	1 unit	Kepolisian	Baik
34	1 (satu) unit mobil mikrolet DT. 1720 BE	1 unit	Kepolisian	Baik
35	1 (satu) lembar STNK DT. 1720 BE	1 lembar	Kepolisian	Baik
36	1 (satu) unit mobil isuzu fanther warna biru DT. 1828 DE beserta kunci kontak	1 unit	Kepolisian	Baik
37	7 (tujuh) buah jergen ukuran 35 Liter	7 buah	Kepolisian	Baik
38	1 (satu) buah potongan selang putih	1 buah	Kepolisian	Baik
39	1 (satu) lembar STNK no. 0032503/SR/2009	1 lembar	Kepolisian	Baik
40	1 (unit) mobil truck warna kuning Dt. 9434 AB beserta kunci kontak	1 mobil	Kepolisian	Baik
41	1 (satu) lembar potongan resi no. 0053644/SR/2012	1 lembar	Kepolisian	Baik
42	1 (satu) buah jergen BBM/solar ukuran 35 Liter	1 buah	Kepolisian	Baik
43	1 (satu) unit mobil Avanza DT. 1786 FE	1 buah	Kepolisian	Baik
44	1 (satu) lembar SIM an. AKBAR	1 lembar	Kepolisian	Baik
45	1 (satu) unit sepeda motor DT. 4053 MD	1 unit	Kepolisian	Baik
46	21 (dua puluh satu) jergen ukuran 35 Liter BBM/solar	21 buah	Kepolisian	Baik
47	813 (Delapan ratus tiga belas) batang kayu rimbah berbagai macam ukuran	1 lembar	Kepolisian	Baik
48	Sepeda Motor JRD	33 Unit	Sda	baik
49	Tangga besi	1 Unit	Sda	Baik
50	As Kuningan Tangga Besi	1 Buah	Sda	Baik
51	Faxmile	3 Buah	Sda	Baik
52	- Papan shio	1 Lbr	Sda	Baik
53	- Buku Pemenang togel	94 Buah	Sda	Baik
54	- Buku Kupon Putih	350 Buah	Sda	Baik
55	- Rekap Kosong	13 Lbr	Sda	Baik
56	- Kertas rekapan	2,5 Rim	Sda	Baik
57	- Kalkulator	12 Buah	Sda	Baik
58	- Buku rekapan besar	186 Buah	Sda	Baik
59	- Spidol warna	5 Buah	Sda	Baik
60	- Table warna	2 Buah	Sda	Baik
61	- Buku Laporan	1 Buah	Sda	Baik
62	- Hekter	4 Dos	Sda	Baik
63	- Isi peluru hekter	5 Dos	Sda	Baik
64	- Spidol	2 Buah	Sda	Baik
65	- Pensil	2 Buah	Sda	Baik
66	- Penghapus	1 Buah	Sda	Baik
67	Sepeda Motor Suzuki Smash DT.4106 QE beserta kunci warna hitam	1 Unit	Sda	Baik
68	Sepeda motor Suzuki A 100 DT.4290 CA	1 Unit	Sda	Rusak Berat
69	Sepeda Motor suzuki Thander tanpa Plat	1 Unit	Sda	Baik
70	Sepeda Dayung Merk Phoenix	1 Unit	Titipan Kejari Kdi	Rusak Barat
71	Sepeda Motor Honda Astra C 86 DT.2867 BE	1 Unit	Sda	Baik
72	Sepeda Motor Honda Supra Fit DT.2450 PE	1 Unit	Sda	Baik
73	Sepeda Motor Honda Karisma tanpa surat-surat dan kunci kontak	2 Unit	Sda	Rusak Berat
74	Sepeda Motor Yamaha DT.3212 FD. Tanpa Kunci Kontak dan Surat-surat	1 Unit	Titipan Kejari Kdi	Baik
75	Sepeda Motor Honda DT.2815 TG. Tanpa Kunci Kontak dan Surat-surat	1 Unit	Titipan Kejari Kdi	Rusak Berat
76	Sepeda Motor Merk Suzuki Smash DT.4106.QE beserta kunci kontak	1 Unit	Kejari Kdi	Baik



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No. 7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

NO	NAMA BASAN/BARANG	JUMLAH	STATUS	KET
1	2	3	4	5
77	Sepeda Motor Merk Suzuki A.100 DT.4290 CA	1 Unit	Kejari	Baik
78	Sepeda Motor Merk Suzuki Thunder tanpa plat	1 Unit	Kejari	Baik
79	Sepeda Dayung Merk Phoenix	1 Unit	Kejari	Baik
80	Sepeda Motor Merk Honda Astrea C86 DT. 2867 BE	1 Unit	Kejari	Baik
81	Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit DT. 2450 PE	1 Unit	Kejari	Baik
82	Sepeda Motor Merk Honda Supra GL 100 warna hitam DT. 2665 BE, tanpa ada surat-surat ,kunci kontak	1 Unit	Polres	Rusak berat
83	Sepeda Motor Merk Yamaha Bebek DT. ..., tanpa ada surat-surat ,kunci kontak	1 Unit	Polres	Rusak berat
84	Sepeda Motor Merk Yamaha Bebek DT. ..., tanpa ada surat-surat ,kunci kontak	1 Unit	Polres	Rusak berat
85	Sepeda Motor HNonda DT.2755 KA. Tanpa Kunci Kontak dan Surat- surat	1 Unit	Titipan Kejari Kdi	Rusak Berat
86	Sepeda Motor Supra Fit DT.2797 AH Tanpa kunci Kontak dan Surat- surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
87	Sepeda Motor Supra Fit DT.2505 BH Tanpa Kunci Kontak dan Surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
88	Sepeda Motor New Fit DT.2169 UE Beserta Kunci kontak dan Surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
89	Sepeda Motor Supra Fit DT.2761 KA tanpa kunci kontak dan tanpa surat-surat	1 Unit	Titipan Kejari Kdi	Rusak Berat
90	Sepeda Motor Supra Fit DT.2022 DE tanpa kunci kontak dan tanpa surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
91	Motor Shogun DT.4880 AD tanpa kunci kontak dan surat-surat	1 Unit	Titipan Polres Kota	Rusak Berat
92	Motor Honda DT.2033 GE tanpa kunci kontak dan surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
93	Motor Kawasaki DT.2771 AE tanpa kunci kontak dan surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
94	Motor Honda GL DT.2665 BE tanpa kunci kontak dan surat-surat	1 Unit	Titipan Polres Kota	Rusak Berat
95	Motor Yamaha bebek DT. tanpa kunci kontak dan surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
96	Motor Honda Prima DT.3315 SA . tanpa kunci kontak dan surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
97	Tempat beras merk Maspion Rice Box	1 Unit	Sda	Rusak
98	Ban Mobil Merk Champiro 60 (terbakar)	1 Buah	Sda	Rusak
99	Kabel Listrik	1 Gulung	Sda	Baik
100	Mesin Dindong	12 Unit	Sda	Rusak Berat
101	Mesin Senso (3 Unit Lengkap Bar dan Mata Rantai, 4 Unit tanpa Bar dan Mata Rantai	7 Unit	Sda	Rusak Berat
102	Motor Honda DT.2099 EE tanpa kunci kontak dan surat-surat	1 Unit	Titipan Polres Kota	Rusak Berat
103	Motor Suzuki Tornado tanpa DT, kunci kontak dan tanpa surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
104	Motor Honda Supra tanpa DT, kunci kontak dan tanpa surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
105	Motor Honda Supra DT.2477 FE Tanpa kunci kontak dan surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
106	Motor Suzuki Satria DT.4242 YE tanpa kunci kontak dan surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
107	Motor Honda Supra DT.2430 CH. Tanpa kunci kontak dan tanpa surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
108	Motor Yamaha Fiz R DT.3360 EE Tanpa kunci kontak dan tanpa surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
109	Motor Kawaski Ninja DT.6022 CE. Tanpa kunci kontak dan tanpa surat-surat	1 Unit	Sda	Rusak Berat
110	Sepeda Dayung tanpa Sadel	1 Unit	Titipan Kejari Kdi	Rusak
111	Beberapa Besi Bekas terpotong-potong		Titipan Kejari Kdi	Rusak
112	Sepeda Motor DT.4137 HE	1 Unit	Titipan kejari Kdi	Rusak
113	Sepeda motor Nopol DT 4055 ME tanpa surat-surat dan kunci	1 Unit	Titipan kejari Kdi	Rusak



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota No. 7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340

NO	NAMA BASAN/BARANG	JUMLAH	STATUS	KET
1	2	3	4	5
	kontak			
114	Mesin Chain Shaw Merk Motoyama	1 Unit	Titipan Kejari Kdi	Rusak
115	3 Buah Pengeras Suara (toa)	3 Buah	Titipan Kejari Kdi	Baik
116	3 Buah Loutspiker warna hitam	3 Buah	Titipan Kejari Kdi	Baik
117	1 Buah Rak Meja	1 Buah	Titipan Kejari Kdi	Baik
118	1 Buah ampli Fair beserta dengan kabel	1 Buah	Titipan Kejari Kdi	Baik
119	1 Buah Maik warna hitam	1 Buah	Titipan Kejari Kdi	Baik
120	1 Buah generator merk daimaru 2.8 HP	1 Buah	Titipan Kejari Kdi	Baik
121	1 Buah papan jln	1 Buah	Titipan Kejari Kdi	Baik
122	1 Buah Dongkrak	1 Buah	Titipan Kejari Kdi	Baik
123	1 Buah ban serep	1 Buah	Titipan Kejari Kdi	Baik
124	1 Buah Lap Mobil	1 Buah	Titipan Kejari Kdi	Baik
125	1 Set Kunci-kunci	1 Buah	Titipan Kejari Kdi	Baik
II	BERHARGA			
	NIHIL	-	-	-
III	BERBAHAYA			
1	Bahan Bakar Minyak jenis solar	40 jerigen	Titipan Kejari	Baik
2	Bahan bakar jenis Solar	45 jerigen	Titipan Polres Kota Kendari	
3	2 buah Tower ukuran 1000 ltr warna kuning serta 1 buah tower ukuran 1000 ltr warna merah yang berisi BBM jenis solar diperkirakan sebanyak 2.105 ltr , 1 buah potongan drum warna merah, 1 buah alat pengisap solar (pompa air)	1.105 ltr	Titipan Polres Kota Kendari	Baik
4	106 jerigen berisi BBM jenis solar yang diperkirakan ukuran lebih 3.531 ltr	106 ltr	Titipan Polres Kolaka	Baik
5	11 buah jerigen kapasitas 35 ltr yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium	11 jerigen	Titipan Polres Kota kendari	Baik
6	4 buah jerigen ukuran 35 ltr yang masih kosong	4 jerigen	Titipan Polres Kota kendari	Baik
7	2 buah Tower ukuran 1000 ltr warna kuning serta 1 buah tower ukuran 1000 ltr warna merah yang berisi BBM jenis solar diperkirakan sebanyak 2.105 ltr	2.105 ltr	Titipan Polres Kota kendari	Baik
8	1 buah potongan drum warna merah	1 buah	Titipan Polres Kota kendari	Baik
9	1 buah alat pengisap solar (pompa air)	1 buah	Titipan Polres Kota kendari	Baik



BAB III

CAPAIAN KINERJA DAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

A. DIVISI ADMINISTRASI

Berdasarkan data yang disajikan pada Bab sebelumnya terlihat bahwa capaian kinerja dari divisi administrasi telah berjalan sesuai dengan rencana namun ada beberapa hal yang pencapaiannya belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala berikut ini :

1. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

Masih seringnya keterlambatan pengiriman laporan dari Unit Pelaksana Teknis maupun dari masing-masing Divisi yang menyebabkan tidak tepat waktunya pengiriman Laporan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara ke Pusat.

2. Bagian Umum.

Kurang optimalnya pekerjaan staf mengenai pengendalian surat-surat baik surat masuk maupun surat keluar yang menyebabkan banyaknya surat yang salah sasaran atau tidak sesuai yang telah didesposisikan serta sulitnya pencarian / penemuan kembali surat / berkas yang telah diarsipkan.

Upaya penyelesaian masalah adalah:

- Perlunya bimbingan teknis tentang penyusunan laporan-laporan yang dibutuhkan (LAKIP, SPIP, Program Aksi, Target Capaian, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan) dalam setiap periode pelaporan agar kesulitan penyusunan laporan yang menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyusunan laporan dapat teratasi.
- Perlu diadakan Diklat Arsiparis dan Ketatausahaan
- Perlu penambahan sarana alat pengolah data seperti komputer.

B. DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian kinerja Divisi Pemasyarakatan dapat digambarkan pada uraian berikut ini :

1. Tugas dan fungsi Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil kerja yang optimal.
2. Dibidang Pelayanan, masih terdapat gangguan ketertiban di Lapas/Rutan karena kurangnya monitoring dan evaluasi minimal Sidak pada UPT Pemasyarakatan.
3. Etos kerja Pegawai yang masih kurang, hal itu dapat terlihat dalam penyelesaian pekerjaan yang masih kurang tepat waktu dan seringkali terlambat dalam masuk kerja.



Untuk memaksimalkan capaian kinerja dari Divisi Pemasarakatan maka perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut :

a. Lapas dan Rutan

- Perlu dibangun beberapa Lapas dan Rutan pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Sulawesi Tenggara yang belum memiliki Lapas maupun Rutan, yang seyogyanya terdapat 1 (satu) Lapas dan 1 (satu) Rutan pada setiap Kabupaten dan Kota.
- Untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan pada Lapas /Rutan maka perlu ditambah jumlah Petugas Pengamanan Lapas/ Rutan di Wilayah Sulawesi Tenggara.

b. Bapas

- Unit Balai Pemasarakatan yang ada, hanya terdapat 2 (dua) unit saja, masih sangat kurang jika melihat jumlah Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Tenggara sebanyak 12 (dua belas), yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kotamadya. Maka sangat diprioritaskan agar ada penambahan Bapas pada beberapa Kabupaten guna menangani wilayah yang jauh dari Bapas yang sudah ada.
- Petugas Bapas yang ada masih terbatas, sehingga perlu ada penambahan jumlah petugas
- Untuk memenuhi target yang ditentukan, perlu adanya penambahan anggaran sehingga volume pekerjaan yang semakin meningkat dapat diatasi

c. Rupbasan

- Rupbasan sudah beroperasi sesuai dengan TUPOKSI yang ada
- Rupbasan telah melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin sesuai dengan sumber daya yg ada, baik tugas pokok maupun fungsinya yang meliputi bidang substantif dan fasilitatif sejalan dengan misi dan visi serta rencana kerja tahunan, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Petugas jaga Basan dan Baran yang ada pada RUPBASAN masih sangat terbatas, dengan melihat beban kerja yang ada, olehnya itu penambahan jumlah petugas jaga sangat di perlukan.
- Rupbasan Kelas I Kendari telah melakukan tugas Penyimpanan Benda/Barang Sitaan sebagai arang bukti juga berfungsi melakukan pengadministrasian, pemeliharaan dan pemutasian serta pengamanan basan/barang.

d. Bahwa Sumber Daya Manusia pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara masih perlu ditingkatkan kualitasnya dan perlu penambahan pegawai baru yang sesuai dengan spesifikasi tugas Pemasarakatan.



C. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dapat digambarkan pada uraian berikut ini :

1. Masyarakat di pedesaan masih banyak yang kurang memahami dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum dan perundang-undangan.
2. Tidak ada dana khusus dalam melakukan pembinaan terhadap desa/kelurahan sadar hukum pada umumnya dan khususnya terhadap pengurus kelompok keluarga sadar hukum yang telah dibentuk.
3. Masih kurangnya kegiatan bimbingan teknis penyuluhan hukum yang mana selama ini bimbingan teknis jarang sekali dilaksanakan.
4. Masih perlu adanya penambahan materi-materi penyuluhan hukum yang berupa literatur, peraturan-peraturan perundang-undangan, brosur-brosur maupun panflet, agar berjalan secara efektif dan efisien.
5. Belum adanya aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang peran serta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam keterlibatan Penyusunan dan Perumusan Perda.
6. Belum adanya Petunjuk Pelaksana tentang Program Pengkajian Hukum.
7. Masih kurangnya jumlah tenaga ahli dibidang perancang Perundang-Undangan (Legal Drafter) di yang dimiliki Bidang Hukum.

D. DIVISI KEIMIGRASIAN

Capaian kinerja Divisi Keimigrasian dapat digambarkan pada uraian berikut ini :

1. Belum adanya Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Prov. Sulawesi Tenggara untuk menampung para pencari suaka/imigran ilegal yang melintas melalui Prov.Sulawesi Tenggara;
2. Tidak adanya kendaraan 4X4 (4 Wheel Drive) untuk menjangkau lokasi-lokasi pertambangan yang terletak di pelosok daerah yang bermedan berat dalam rangka melakukan pengawasan dan pemeriksaan Keimigrasian.

Untuk memaksimalkan capaian kinerja dari Divisi Keimigrasian beberapa hal yang telah dan akan dilakukan sebagai berikut :

- Memaksimalkan pelayanan 3 (tiga) hari untuk proses permohonan paspor sampai proses foto, serta 3 (tiga) hari penyelesaian setelah proses foto;
- Dikarenakan belum adanya Rudenim di Prov. Sulawesi Tenggara untuk sementara para pencari suaka / imigran ilegal di tempatkan di beberapa penginapan di Kota Kendari dan sebagian lainnya telah dikirim ke Rudenim di seluruh Indonesia;
- Menyewa kendaraan yang sesuai dengan luasnya wilayah dan sulitnya medan yang akan dilalui guna pengawasan Keimigrasian.
- Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengajuan permohonan SPRI melalui Internet terutama masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan.



BAB IV ANALISA DAN EVALUASI

Berdasarkan data dan fakta dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2016 maka dapat disimpulkan berbagai hambatan dan analisa capaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas tersebut.

Dari data hambatan-hambatan yang tertera pada bab III maka dapat kami berikan kesimpulan mengenai pemecahan masalah tersebut, hambatan tersebut diantaranya :

A. Hambatan

- Kurangnya pemahaman bidang tugas Administrasi;
- Kurangnya dukungan sarana dan prasarana;
- Belum optimalnya penggunaan sarana komunikasi informasi;
- Kurangnya kedisiplinan pegawai;
- Belum optimalnya kerjasama dengan instansi terkait.

B. Pemecahan Masalah

- Melaksanakan Diklat Teknis, sosialisasi bidang tugas administratif guna peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas;
- Mengoptimalkan penggunaan internet sebagai media informasi dan komunikasi;
- Mewujudkan kedisiplinan pegawai melalui peningkatan pengawasan;
- Mewujudkan kerjasama yang optimal dengan instansi terkait.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

I. Administrasi dan Fasilitatif

Administratif dan fasilitatif (Bagian Umum dan Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan) pelaksanaan tugas berjalan dengan baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian (mengarahkan dan Evaluating) terutama terhadap penyelesaian tata persuratan, perencanaan, pengawasan disiplin pegawai menunjukkan peningkatan.

II. Substantif.

1. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berjalan sebagaimana diharapkan, meskipun pelaksanaan Penyuluhan Hukum banyak hambatan- hambatan antara lain terbatasnya sarana transportasi baik transportasi laut maupun darat untuk menjangkau lokasi/Desa, yang letaknya berada dipelosok dan pulau-pulau.

2. Divisi Pemasarakatan

Untuk menciptakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang baik dan dapat menjadi "PENGAYOM" bagi masyarakat yang bertujuan mereformasi birokrasi dan jajarannya kearah yang lebih baik maka perlu Pelayanan Prima/Pelayanan yang berkualitas, diantaranya; Penambahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemasarakatan Penambahan dan perbaikan infrastruktur Pemasarakatan .

Pelaksanaan tugas telah berjalan dengan baik, sehingga tidak kekurangan bahan makanan baik beras maupun non beras/ lauk pauk untuk narapidana dan tahanan.

Unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang over kapasitas, secara bertahap telah dilakukan pemindahan narapidana B.I (hukuman diatas 1 tahun) ke lapas Kelas IIA Kendari. Bahwa Sumber Daya Manusia pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara masih perlu di tingkatkan kualitasnya dan perlu penambahan pegawai baru yang sesuai dengan spesifikasi tugas Pemasarakatan.

Untuk mendukung terlaksananya program kerja perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai sesuai standar pembinaan, keamanan, dan dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana yang baru

3. Divisi Keimigrasian



Dengan berkembangnya pembangunan Sulawesi Tenggara maka permohonan perizinan Keimigrasian bagi WNI maupun WNA menunjukkan kecenderungan meningkat, tetapi sarana transportasi terutama ke wilayah kepulauan relatif tidak ada kemajuan sehingga tetap menyulitkan pelayanan keimigrasian.

Jumlah pegawai Divisi Imigrasi sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari Kepala Divisi 1 (satu) orang, Kepala Bidang 2 (dua) orang, Kepala Sub Bidang 4 (empat) orang dan Staf 9 (sembilan) orang dan terkait Pelaksanaan Teknis di Sulawesi Tenggara sudah ada 3 (tiga) UPT yang terdiri dari Kanim Kelas I Kendari, Kanim Kelas III Baubau, dan Kanim Kelas III Wakatobi. Namun ada satu UPT yang Wilayah kerjanya sangat luas yakni Kanim Kelas I Kendari, yang mengawasi 1 (satu) Kota dan 9 (sembilan) Kabupaten.

Dengan telah diluncurkannya pelayanan keimigrasian berbasis elektronik (e-passport, e-KITAS dll) di beberapa faktor Kantor imigrasi, maka dirasa perlu pemberian kemudahan bagi pemohon SPRI agar dapat mengajukan permohonan melalui media elektronik (internet) terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan.

B. SARAN

1. Diusulkan penambahan pegawai untuk golongan II dan III pada di unit pelaksana teknis.
2. Bahwa agar dapat pengisian jabatan Struktural yang masih kosong di Kantor Wilayah yaitu di Divisi Keimigrasian.
3. Perlu diusulkan pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III baru, mengingat Wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sangat luas, seiring Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara adalah daerah penghasil nikel dan emas yang perencanaan Pemerintah Pusat telah dibangun smelter/pabrik pengolahan hasil tambang yang berlokasi di Morowali daerah perbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga diharapkan pada rekrutmen pegawai dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan khusus Lapas dan Rutan . Dan dalam perancangan pembangunan/rehabilitasi gedung Unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dalam lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara khususnya Lapas dan Rutan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan memenuhi aspek pengamanan.
5. Penyediaan kendaraan operasional trans Pemasarakatan mengingat kondisi geografis wilayah kerja Lapas dan Rutan di Sulawesi Tenggara yang sangat luas dan sulit dijangkau oleh kendaraan biasa.
6. Guna penyetaraan kedudukan eselonering dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sedapat mungkin eselonering/pejabat struktural pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dapat



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

*Jalan Balai Kota No. 7A Kota Kendari 93117
Telp. (0401) 3122132 Fax. (0401) 3121340*

ditingkatkan utamanya Rutan, Bapas, serta Rupbasan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Demikian laporan Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Tahun 2016 dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kendari, 10 Januari 2017
an. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,



Ir. H. Abd Rahman L, MH
NIP 195908171986031001